



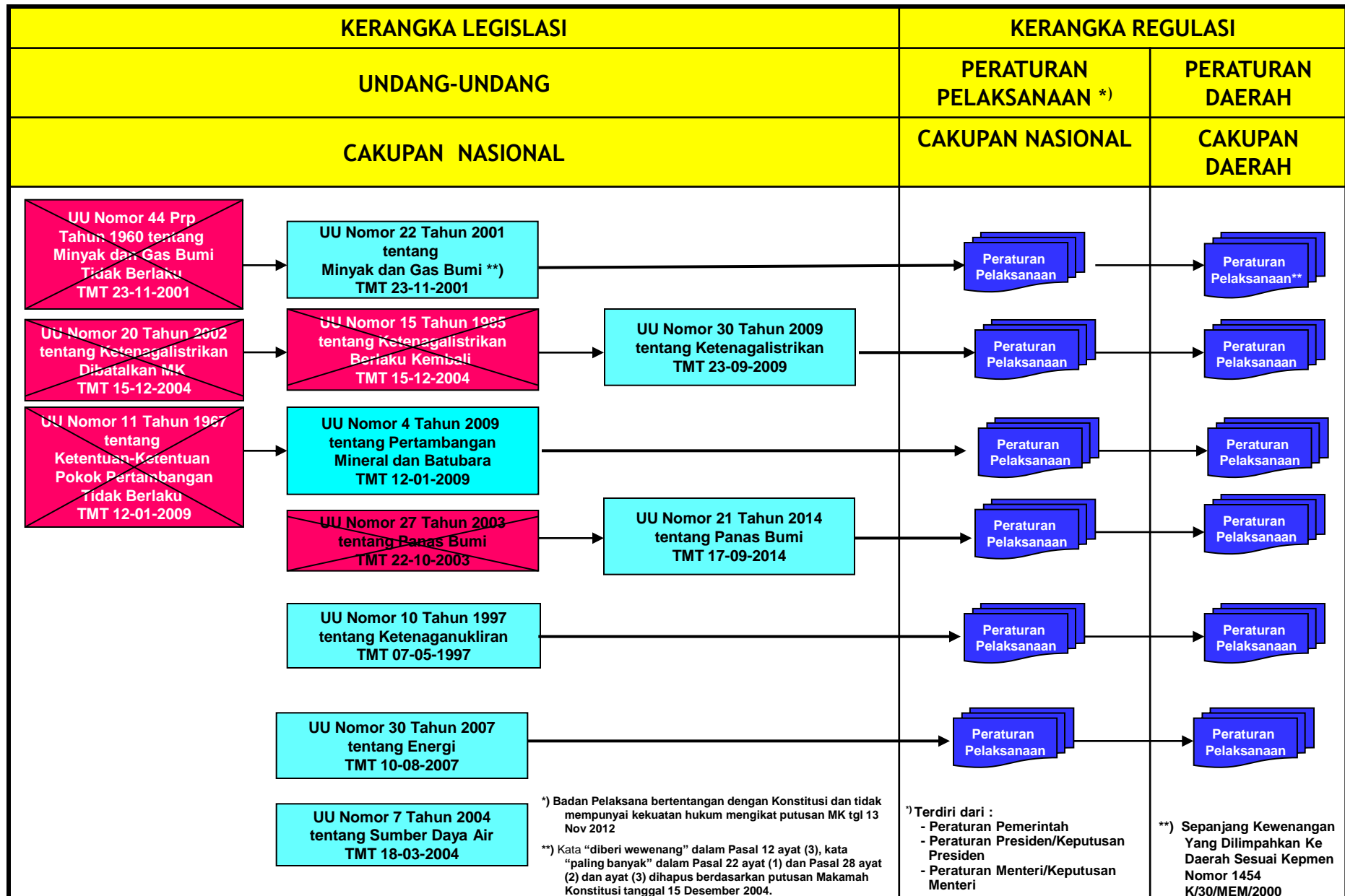
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

KERANGKA LEGISLASI DAN REGULASI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

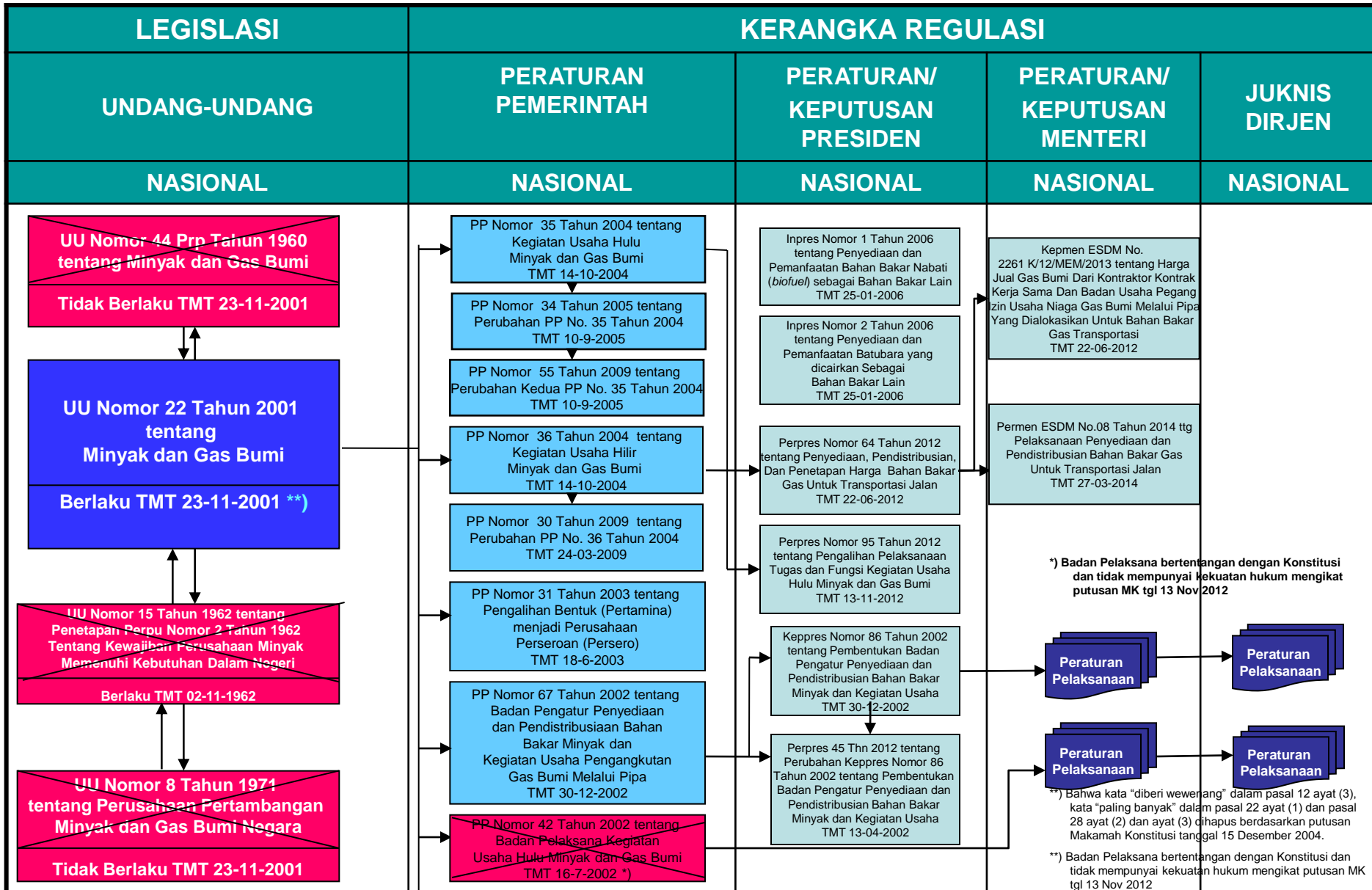
www.jdih.esdm.go.id

Jakarta, Januari 2015

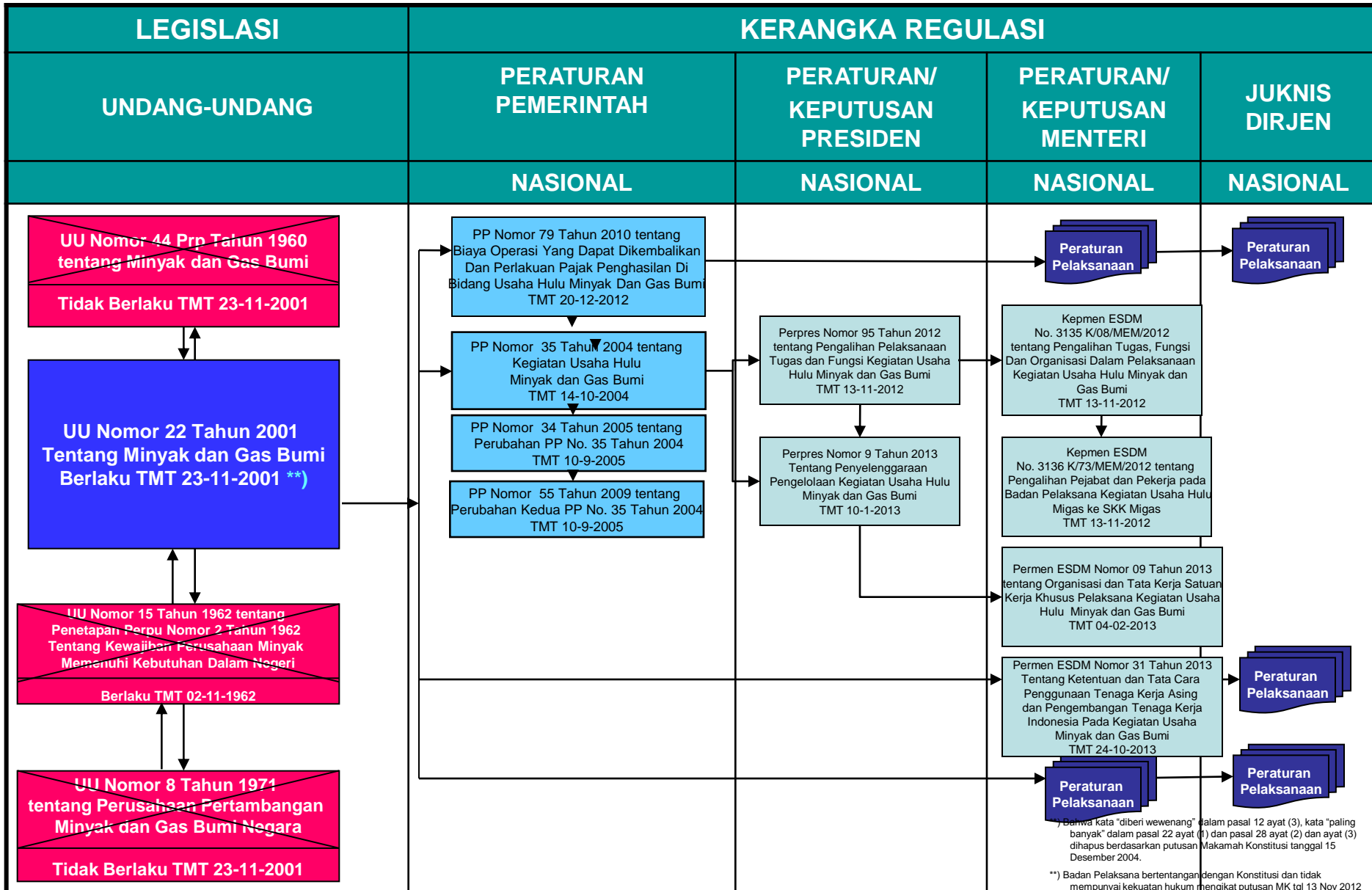
KERANGKA LEGISLASI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



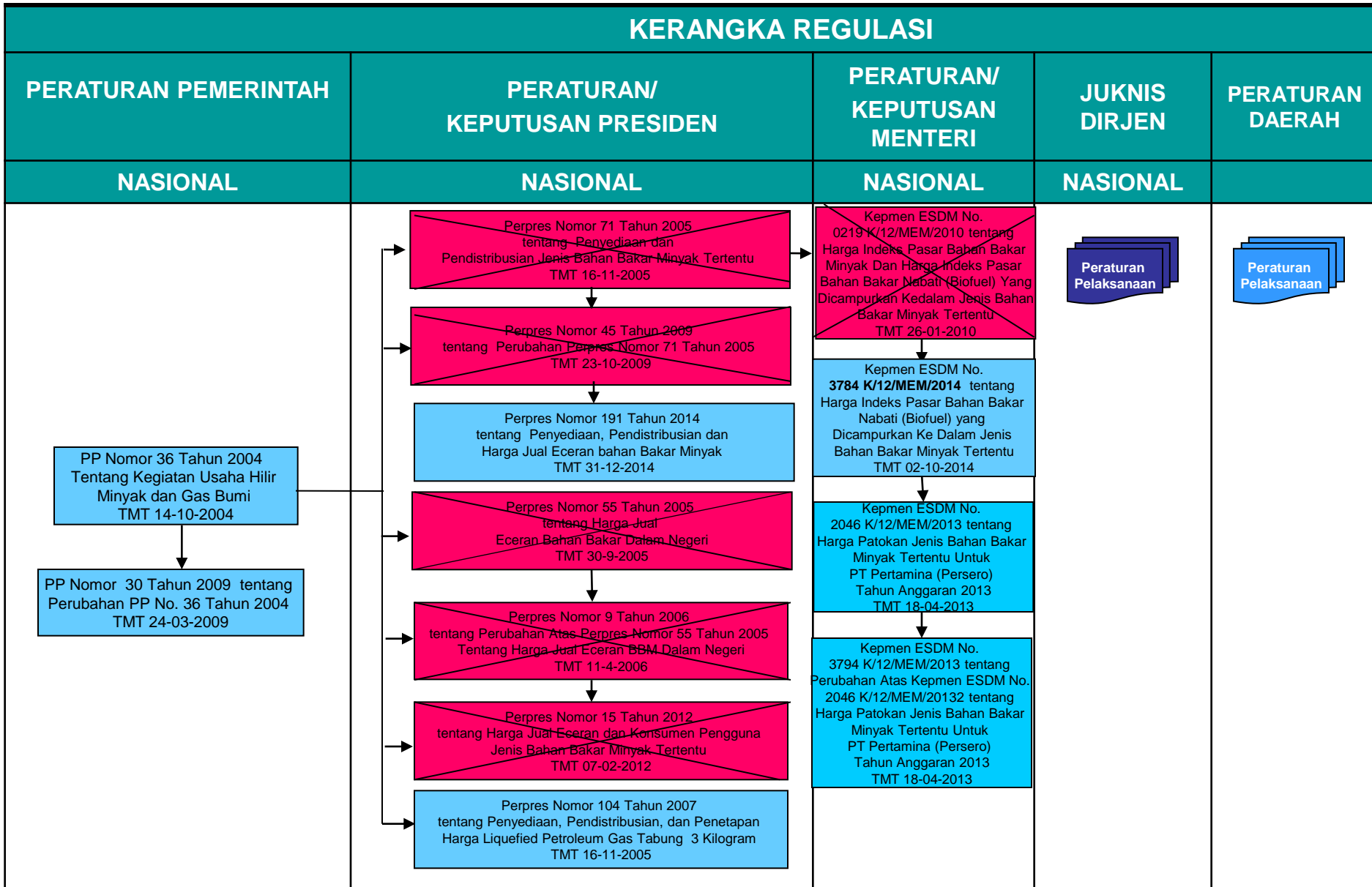
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



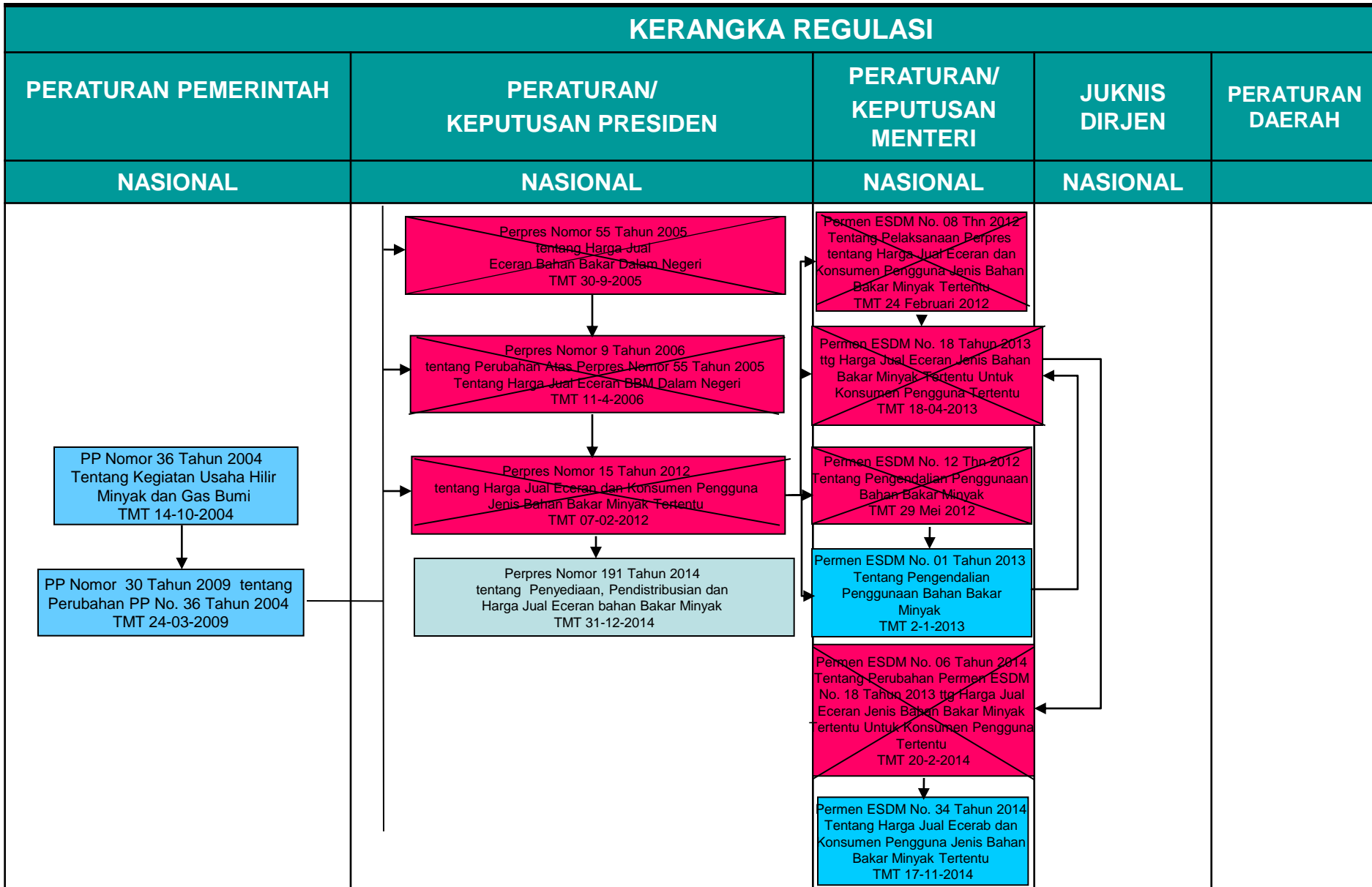
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



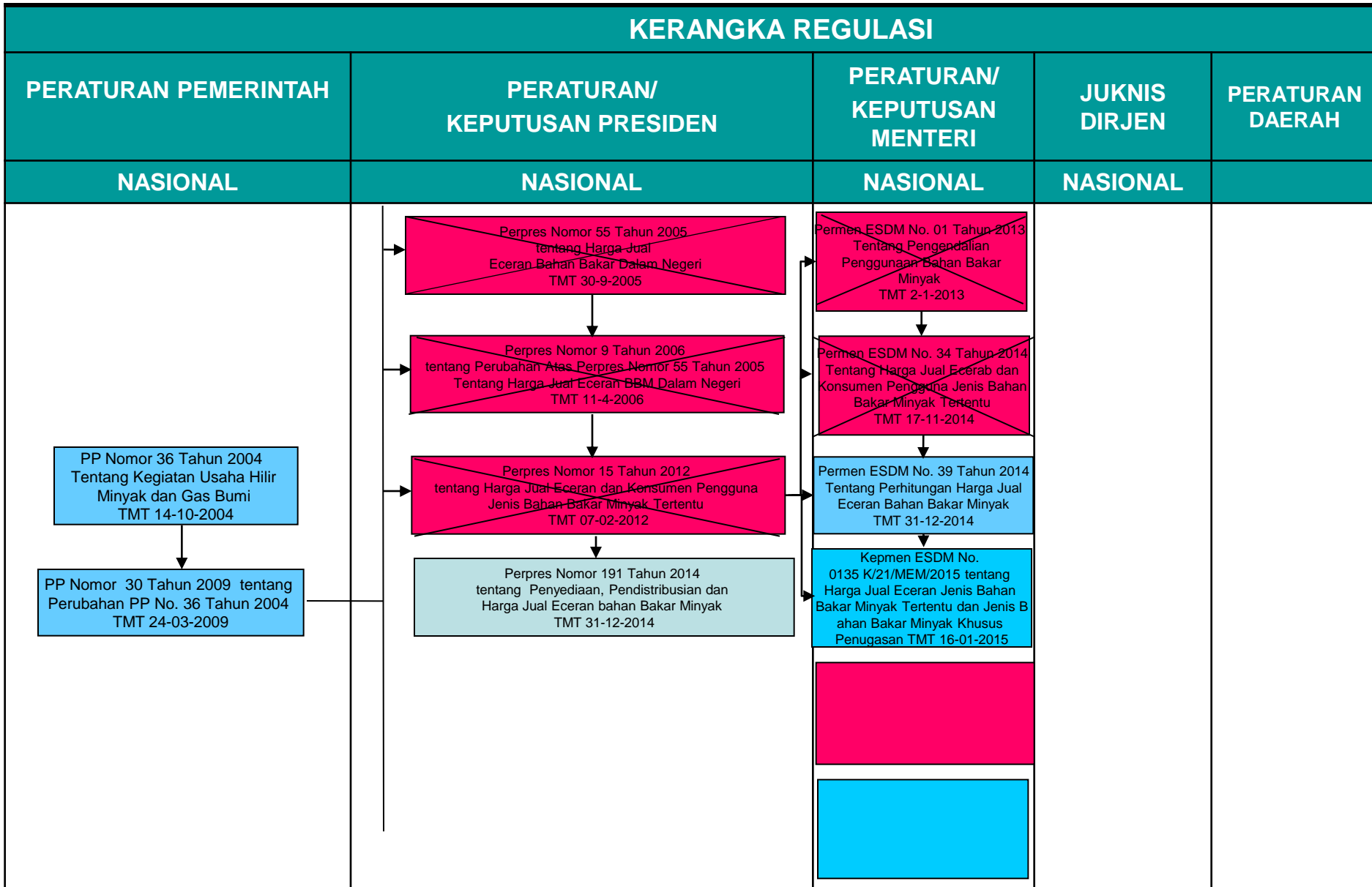
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



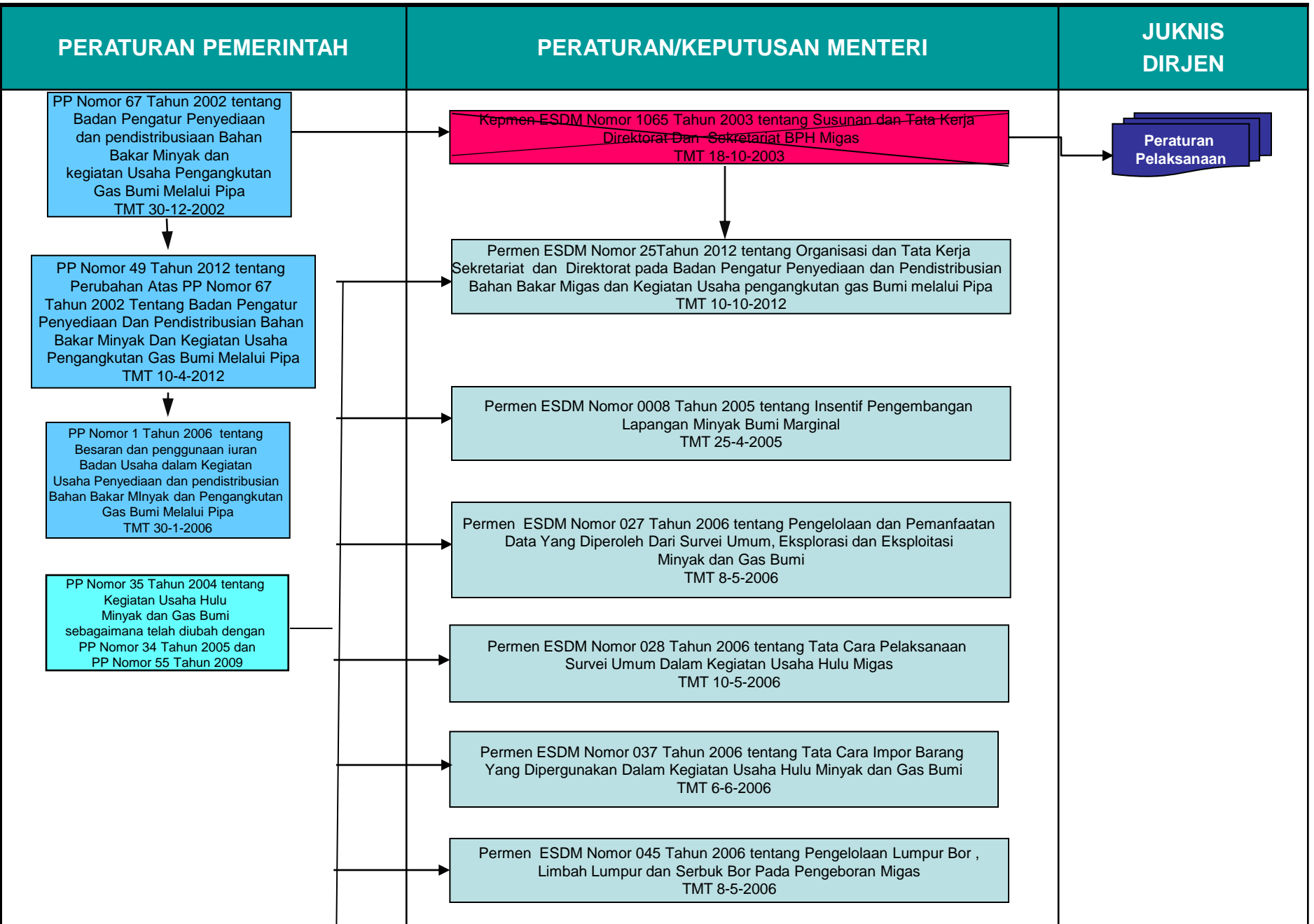
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p>PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 34 Tahun 2005 dan PP Nomor 55 Tahun 2009</p>	<p>Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Berlaku TMT 5-02-2008</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak Dan Gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Berlaku TMT 5-02-2008</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi Berlaku TMT 5-02-2008</p>	
	<p>Permen ESDM No. 21 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi TMT 30-06-2008</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Berlaku TMT 30-06-2008</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi Berlaku TMT 12-11-2008</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara TMT 12-11-2008</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi Dan Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri TMT 27-01-2010</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p>PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 34 Tahun 2005 dan PP Nomor 55 Tahun 2009</p>	<p>Permen ESDM Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi Berlaku TMT 2-02-2010</p> <p>Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas pantai Minyak Dan Gas Bumi Berlaku TMT 7-01-2011</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 2763 K/12/MEM/2011 tentang Tambahan Alokasi Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik Tahun 2011 Berlaku TMT 28-10-2011</p> <p>Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Berlaku TMT 31-01-2012</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 2576 K/12/MEM/2012 tentang Formula Dan Besaran Imbalan (Fee) Pengelolaan Dan/Atau Penjualan Minyak Dan/Atau Gas Bumi Untuk PT Pertamina (Persero) TMT 28-8-2012</p> <p>Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia TMT 5-09-2012</p> <p>Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (<i>Flaring</i>) pada Kegiatan Usaha Minyak dan gas Bumi TMT 21-12-2012</p> <p>Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi TMT 22-2-2013</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4b4b9b; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 5px;"> PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 2004 TMT 24-03-2009 </div>	→	Permen ESDM Nomor 0044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar minyak Tertentu TMT 22-12-2005
	→	Permen ESDM Nomor 0048 Tahun 2005 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Serta pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri TMT 30-12-2005
	→	Permen ESDM Nomor 019 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa TMT 31-08- 2009
	→	Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi gas Bumi Untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah TMT 30-09- 2009
	→	 Kepmen ESDM Nomor 0225K/11/MEM/2010 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2010-2025 TMT 27-1-2010
	→	Kepmen ESDM Nomor 2700K/11/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012-2025 TMT 6-9-2012
	→	Permen ESDM Nomor 026 Tahun 2006 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional TMT 8-05-2006
	→	Permen ESDM Nomor 053 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri TMT 30-10-2006
	→	Kepmen ESDM Nomor 1121 K/24/MEM/2002 tentang Pelimpahan wewenang pemberian pertimbangan tertulis fabrikasi Pelumas, pengolahan pelumas bekas dan pengemasan pelumas kepada Dirjen Migas TMT 12-6-2002

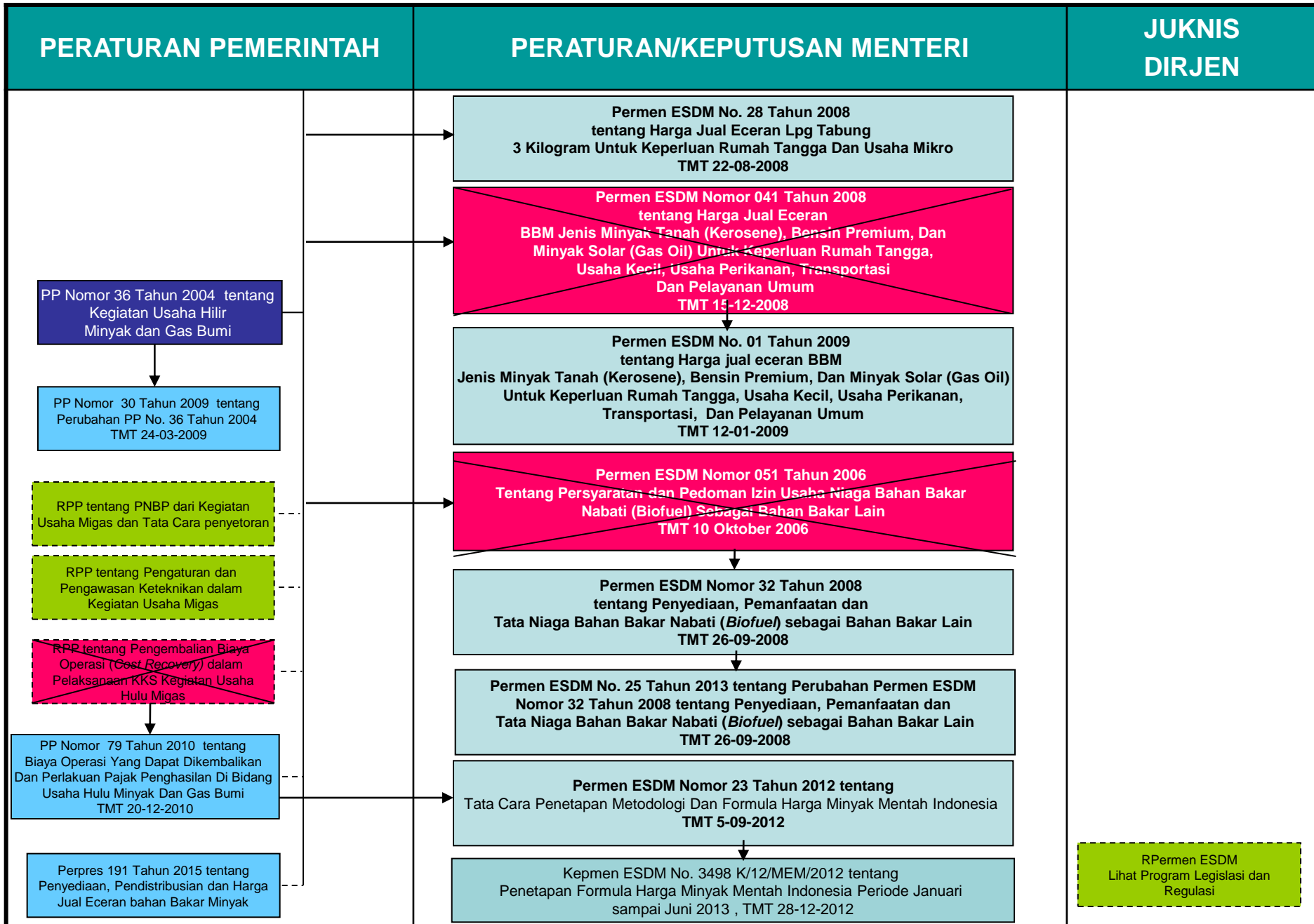
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p>PP Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) TMT 18-6-2003</p>	<p>Peraturan Bersama ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN No. 14 tahun 2013, No. 33/PMK.06/2013, No. Per-01/MBU/2013 tentang Status Kepemilikan Asset Panas Bumi Yang Berasal Dari Kontrak Operasi Bersama (<i>Joint Operation Contract</i>) TMT 8-02-2013</p>	
<p>PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi</p>	<p>Kepmen ESDM Nomor 2043K/20/MEM/2005 tentang Penugasan PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di Seluruh Indonesia TMT 21-12-2005</p>	
<p>PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 2004 TMT 24-03-2009</p>	<p>Kepmen ESDM Nomor 2808 K/20/MEM/2006 Tentang Standar dan Mutu Spesifikasi pelumas yang Dipasarkan Di Dalam Negeri TMT 6-12-2006</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. TMT 19-12-2007</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg TMT 19-12-2007</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi TMT 13-6-2008</p>	
	<p>Kepmen ESDM Nomor 2790 K/12/MEM/12 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan Dan Pendistribusian Paket Perdana Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun 2012, TMT 10-06-2008</p>	
	<p>Kepmen ESDM Nomor 1788K/70/MEM/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang MESDM kepada Dirjen Migas Pada Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg TMT 10-06-2008</p>	

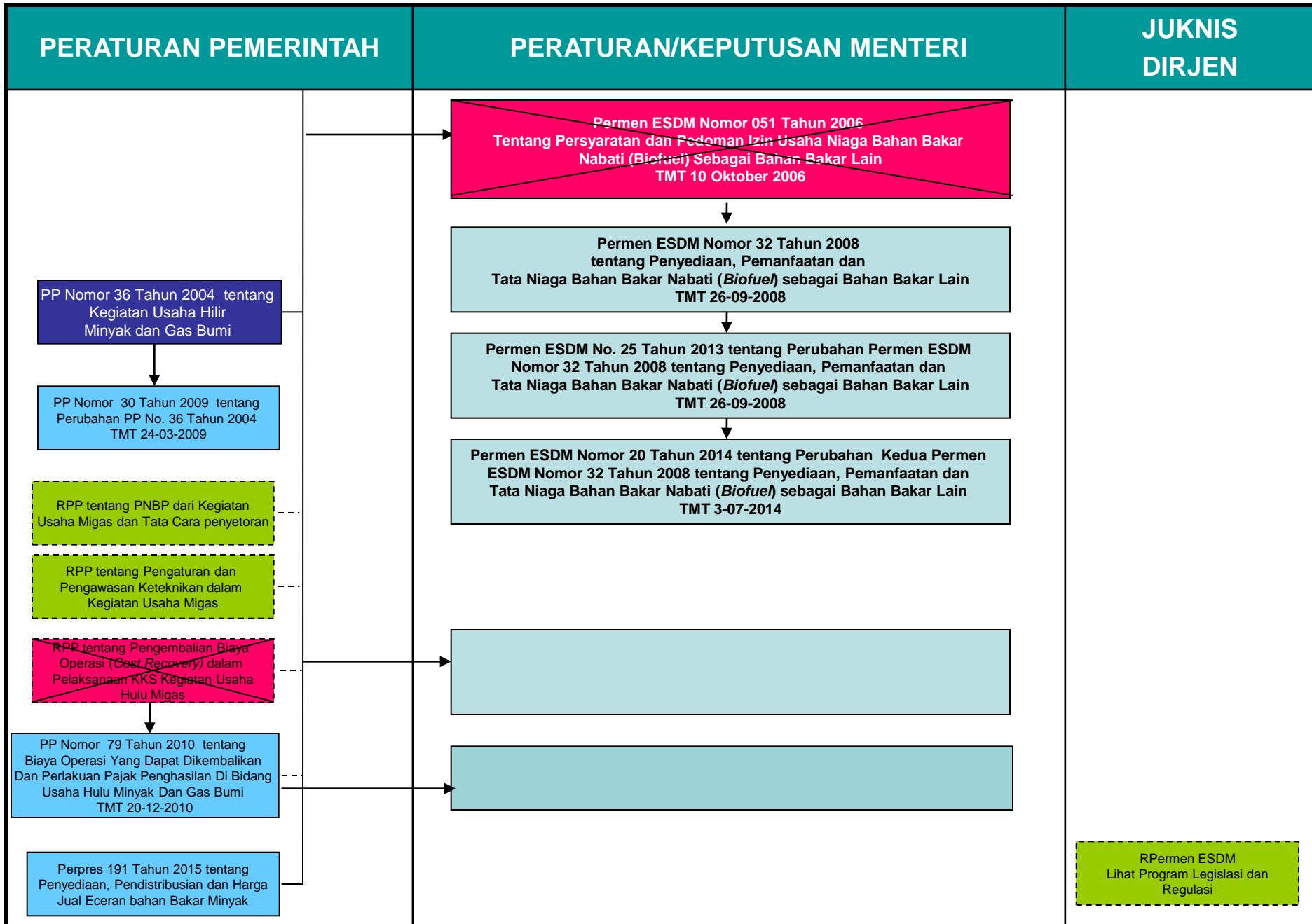
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4b4b9b; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 5px;"> PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 2004 TMT 24-03-2009 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Permen ESDM No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Usaha Kecil TMT 31-03-2008 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Permen ESDM No. 15 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan SNI Mengenai Sistem Transportasi Cairan untuk Hidrokarbon dan SNI Mengenai Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas Sebagai Standar Wajib TMT 16-05-2008 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Permen ESDM No. 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran BBM Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum TMT 23-05-2008 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Permen ESDM No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tatacara Perlindungan Konsumen pada kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi TMT 13-06-2008 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 Penyediaan dan Pendistribusian LPG TMT 29-09-2009 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> Kepmen ESDM No. 4276 K/10/MEM/2014 tentang Wilayah Distribusi <i>Liquefied Petroleum Gas</i> Tertentu TMT 24-12-2014 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ff00ff; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center; opacity: 0.5;"> Permen ESDM No. 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Migas Secara Wajib TMT 30-06-2008 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; text-align: center;"> Permen ESDM No. 05 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib TMT 20-01-2015 </div>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI



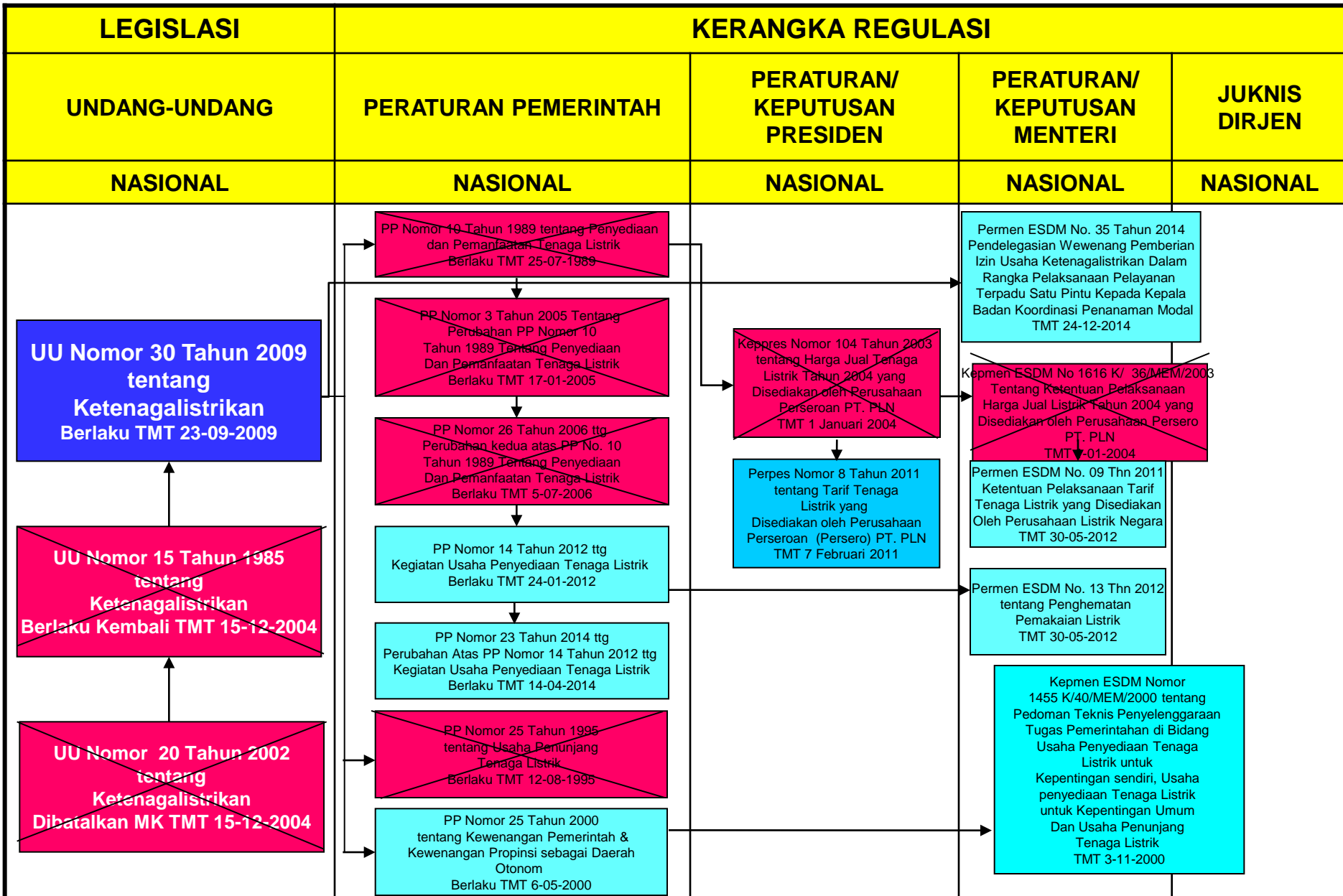
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi TMT 20-12-2010 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi Dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia TMT 5-09-2012 </div>	
	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Kepmen ESDM No. 1101 K/12/MEM/2013 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Januari 2013 TMT 22-02-2013 </div>	
	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Kepmen ESDM No. 2027 K/12/MEM/2013 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Maret 2013 TMT 16-04-2013 </div>	
	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Kepmen ESDM No. 0188 K/12/MEM/2015 tentang Penetapan Harga Minyak Mentah Indonesia Bulan Desember 2014 TMT 20-01-2015 </div>	
	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div>	
	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; height: 40px; margin-bottom: 10px;"></div>	
	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; height: 40px;"></div>	

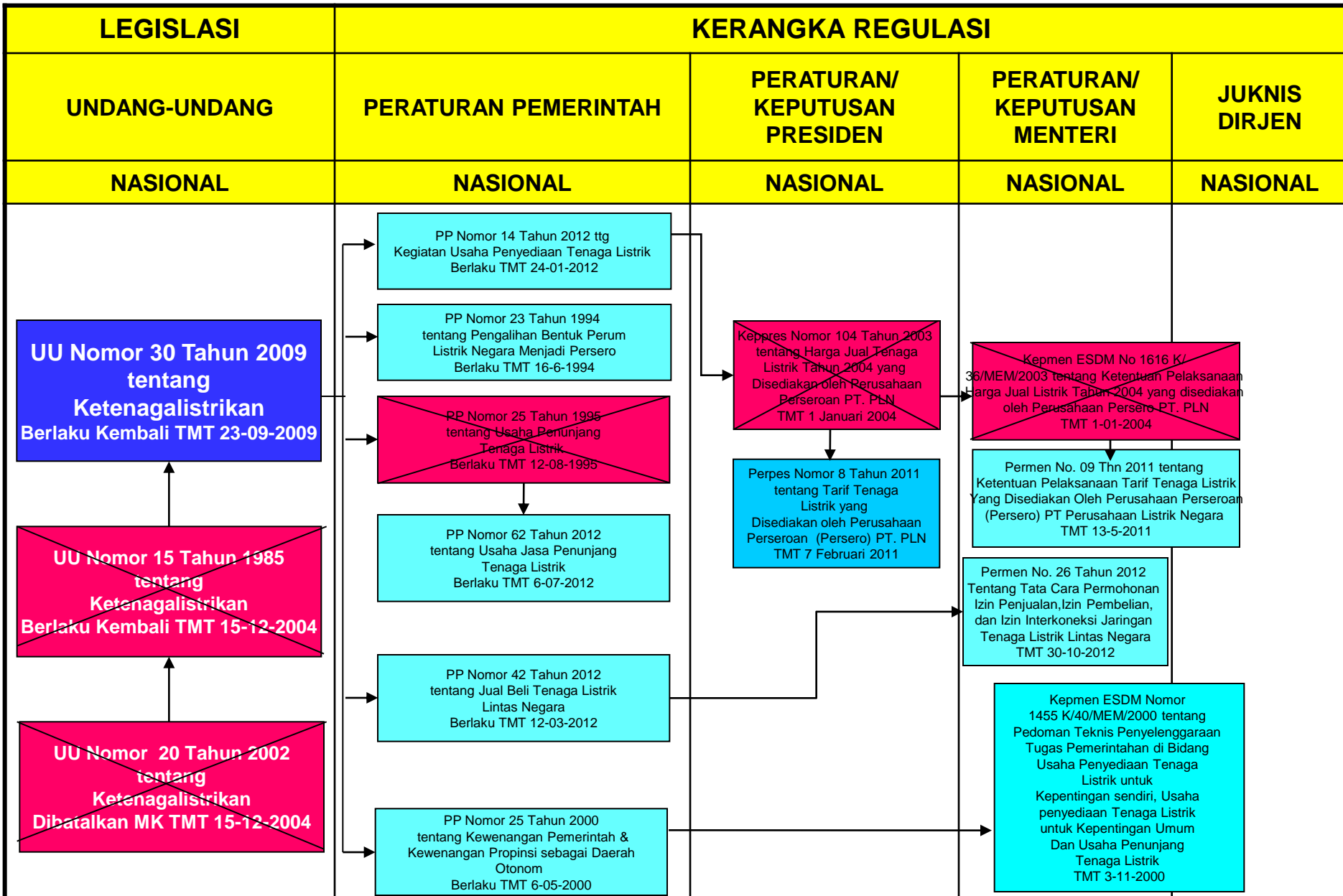
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<div style="border: 1px solid black; background-color: #4b4b9b; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 5px;"> PP Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No. 36 Tahun 2004 TMT 24-03-2009 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Permen ESDM No. 22 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Diklat Inspektur Minyak dan Gas Bumi Pertama TMT 29-09-2009 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Permen ESDM No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak TMT 01-11-2011 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Permen ESDM No. 27 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak TMT 01-11-2011 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Kepmen ESDM No. 1713 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan Jenis bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012 TMT 17-4-2012 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Kepmen ESDM No. 3372 K/12/MEM/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1713 K/12/MEM/2012 Tanggal 17 April 2012 Tentang Harga Patokan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun Anggaran 2012 TMT 21-12-2012 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> Kepmen ESDM No. 1714 K/12/MEM/2012 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2012 TMT 17-4-2012 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 10px;"> Permen ESDM No. 29 Tahun 2013 tentang Penyediaan, Pemanfaatn dan Tata Niaga Dimetil Eter Sebagai Bahan Bakar TMT 13-09-2013 </div>	

KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN



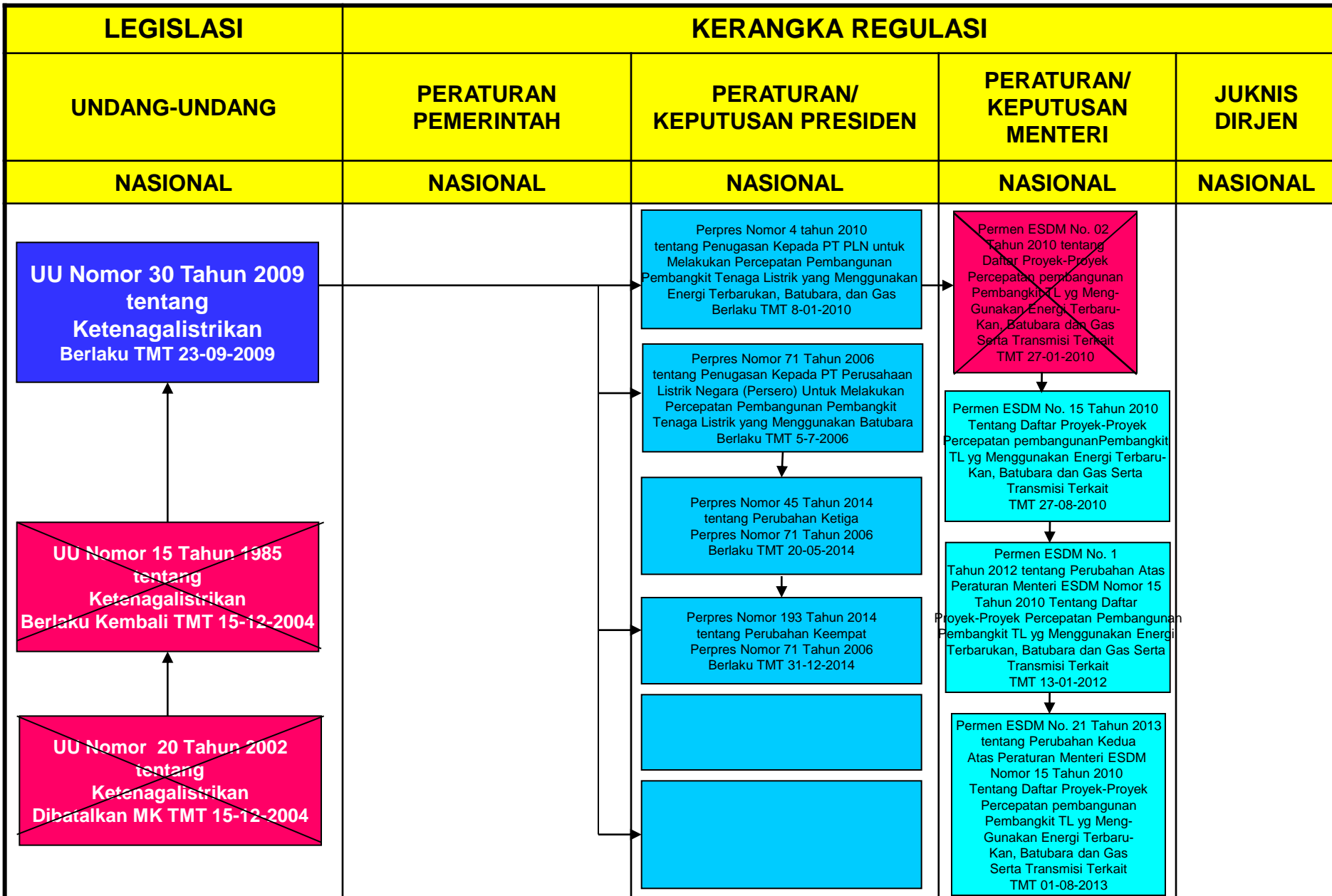
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN



KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

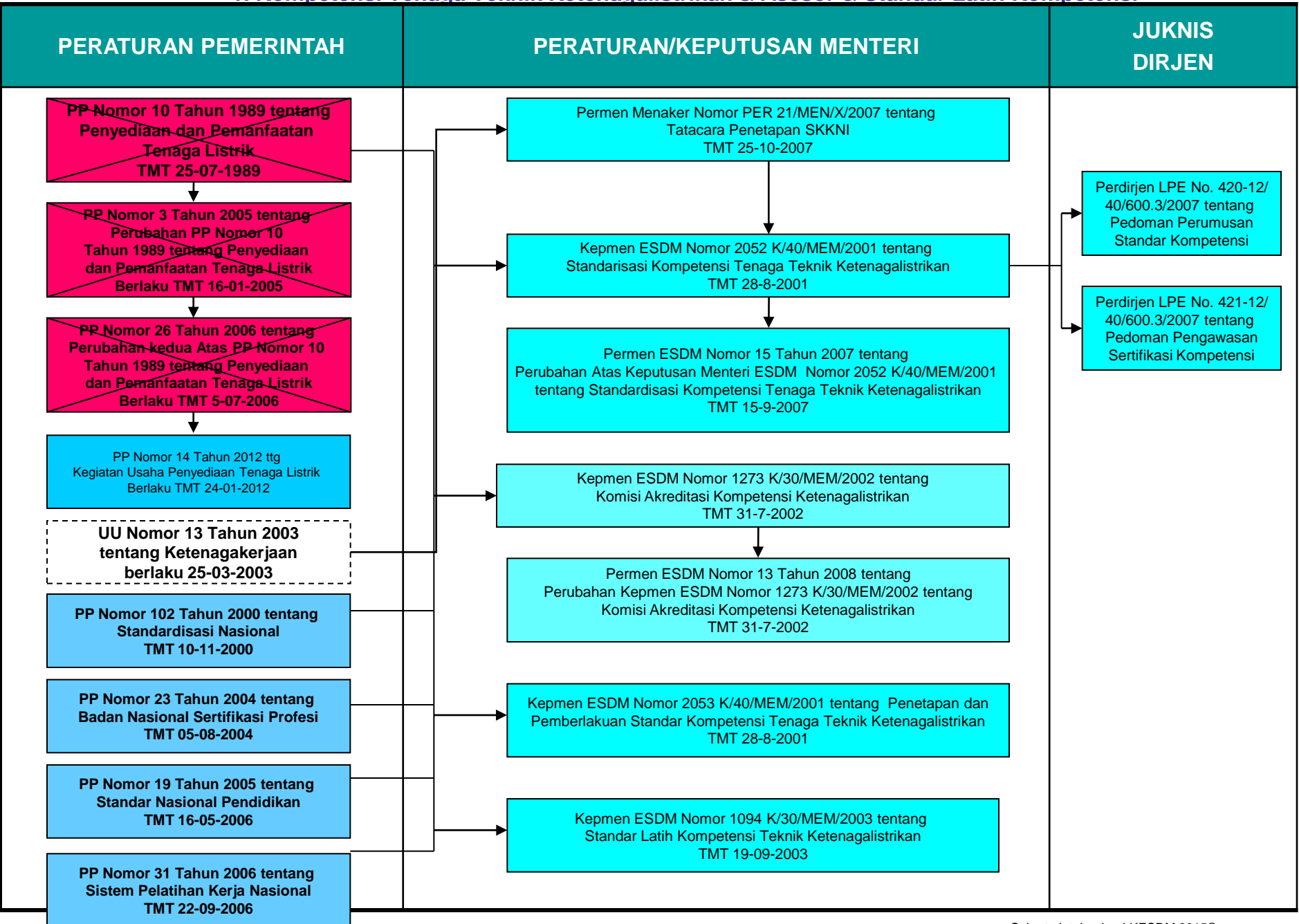
LEGISLASI	KERANGKA REGULASI			
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL
<div style="border: 1px solid black; background-color: blue; color: white; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Berlaku TMT 23-09-2009 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: pink; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px; opacity: 0.5;"> UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Berlaku Kembali TMT 15-12-2004 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: pink; padding: 5px; text-align: center; opacity: 0.5;"> UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Dibatalkan MK TMT 15-12-2004 </div>		<div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Perpres Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara Berlaku TMT 5-7-2006 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Perpres Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Perpres Nomor 71 Tahun 2006 Berlaku TMT 23-12-2009 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 71 Tahun 2006 Berlaku TMT 23-12-2009 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Perpres Nomor 72 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berlaku TMT 5-7-2006 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Perpres Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 72 Tahun 2006 Berlaku TMT 22-1-2010 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Perpres Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perpres Nomor 72 Tahun 2006 Berlaku TMT 22-01-2010 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> Perpres Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara Berlaku TMT 18-10-2006 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: lightblue; padding: 5px; text-align: center;"> Perpres Nomor 91 tahun 2007 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 86 tahun 2006 Berlaku TMT 19-9-2007 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: pink; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px; opacity: 0.5;"> Permen ESDM No. 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Koperasi atau Badan Usaha Lain TMT 18-06-2009 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: pink; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px; opacity: 0.5;"> Permen ESDM No. 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan menengah atau Kelebihan tenaga listrik TMT 13-11-2009 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: cyan; padding: 5px; text-align: center;"> Permen ESDM No. 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil dan menengah atau Kelebihan tenaga listrik TMT 31-1-2012 </div>	

KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan & Asesor & Standar Latih Kompetensi



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan & Asesor & Standar Latih Kompetensi (Lanjutan)

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
	<p data-bbox="768 301 865 315">→</p> <p data-bbox="865 229 1466 368">Kepmen ESDM Nomor 1187 K/2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Pemeliharaan TMT 2 Juli 2002</p> <p data-bbox="768 451 865 465">→</p> <p data-bbox="865 382 1466 504">Kepmen ESDM Nomor 1188 K/2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi TMT 2 Juli 2002</p> <p data-bbox="768 586 865 601">→</p> <p data-bbox="865 532 1466 654">Kepmen ESDM Nomor 1189 K/30/MEM/2002 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi TMT 2 Juli 2002</p> <p data-bbox="768 736 865 751">→</p> <p data-bbox="865 668 1466 846">Permen ESDM Nomor 0040 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi, Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Kontruksi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Inspeksi dan Sub Bidang Perencanaan TMT 6 Oktober 2005</p> <p data-bbox="768 951 865 965">→</p> <p data-bbox="865 875 1466 1075">Permen ESDM Nomor 0042 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu, Sub Bidang Penunjang dan Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi TMT 6 Oktober 2005</p> <p data-bbox="768 1279 865 1293">→</p> <p data-bbox="865 1146 1466 1346">Permen ESDM Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Sub Bidang Perancangan, Perencanaan, Konstruksi dan Inspeksi TMT 30-09-2009</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan & Asesor & Standar Latih Kompetensi (Lanjutan)

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
	<p data-bbox="859 239 1470 372">→ Permen ESDM no. 30 Tahun 2008 Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi Dan Sub Bidang Inspeksi TMT 18-09-2008</p> <p data-bbox="859 411 1470 544">→ Permen ESDM no. 31 Tahun 2008 Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan Dan Sub Bidang Inspeksi TMT 18-09-2008</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan & Asesor & Standar Latih Kompetensi (Lanjutan)

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
	<p>→ Permen ESDM no. 4 Tahun 2008 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik TMT 29-02-2008</p> <p>→ Permen ESDM no. 5 Tahun 2008 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi Baru Dan Terbarukan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBM), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) TMT 29-02-2008</p> <p>→ Permen ESDM no. 6 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi Dan Sub Bidang Pemeliharaan TMT 29-02-2008</p> <p>→ Permen ESDM no. 7 Tahun 2008 tentang Penetapan dan pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Subbidang Operasi, Subbidang Pemeliharaan SuB Biang Konstruksi dan Subbidang Inspeksi TMT 29-02-2008</p> <p>→ Permen ESDM no. 8 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Distribusi Tenaga Listrik Subbidang Operasi dan Subbidang Pemelihara TMT 29-02-2008</p> <p>→ Permen ESDM no. 9 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi Dan Sub Bidang Inspeksi TMT 29-02-2008</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan & Asesor & Standar Latih Kompetensi (Lanjutan)

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
	<p>Permen ESDM no. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Jasa Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Listrik TMT 28-04-2009</p> <p>Permen ESDM no. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian Dan Kendali Mutu, Dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan Dan Pemasangan TMT 28-04-2009</p> <p>Permen ESDM no. 8 Tahun 2009 Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Manufaktur, Dan Sub Bidang Pengendalian Dan Jaminan Mutu TMT 28-04-2009</p> <p>Permen ESDM no. 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Sub Bidang Perancangan, Perencanaan, Konstruksi dan Inspeksi TMT 29-09-2009</p> <p>Permen ESDM no. 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Diklat Teknis Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru dan Terbarukan TMT 29-09-2009</p> <p>Rpermen tentang Penggunaan Tenaga Kerja WNA di Sektor Ketenagalistrikan</p>	

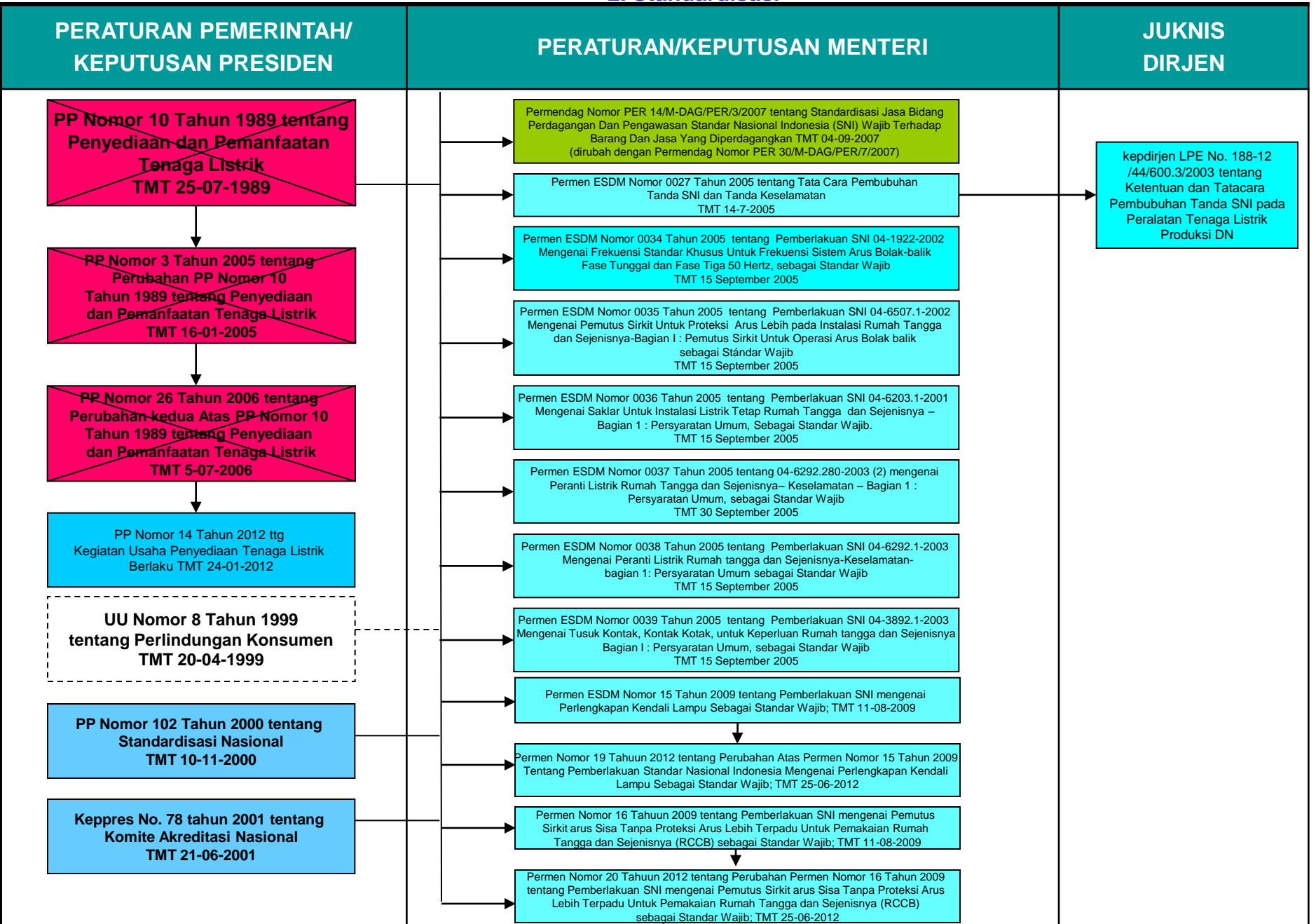
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

1. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan & Asesor & Standar Latih Kompetensi (Lanjutan)

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI		JUKNIS DIRJEN
		<p data-bbox="904 297 1514 445">Permen ESDM No. 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi Dan Sub Bidang Pemeliharaan TMT 03-08-2011</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

2. Standardisasi



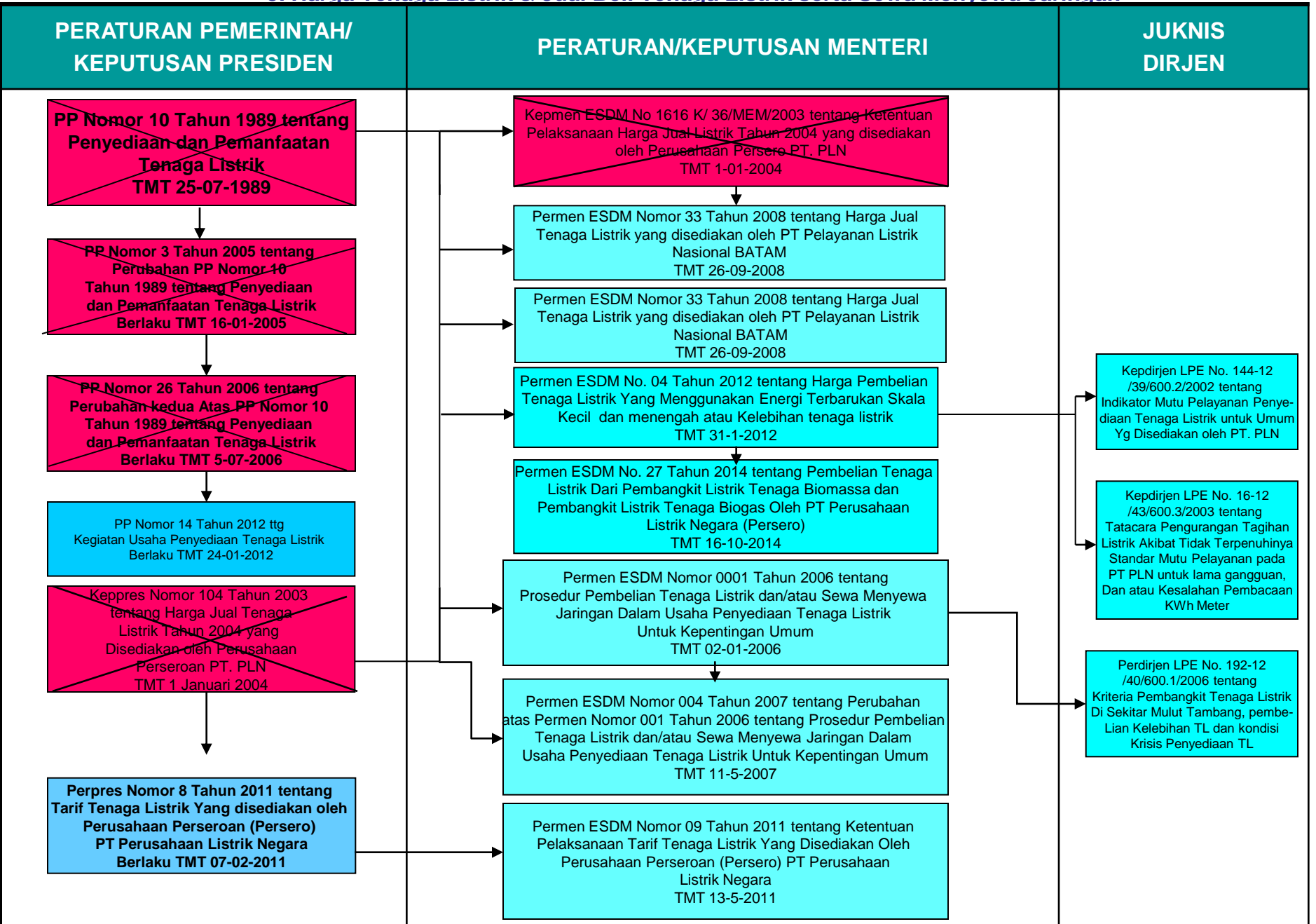
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

2. Standardisasi

PERATURAN PEMERINTAH/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
	<pre> graph TD A[Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang PemberlakuanSNI mengenai Luminer sebagai Standar Wajib; TMT 11-08-2009] --> B[Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Permen Nomor 17 Tahun 2009 tentang PemberlakuanSNI mengenai Luminer sebagai Standar Wajib; TMT 11-08-2009] B --> C[Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast; TMT 19 April 2011] C --> D[Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast; TMT 18-06-2014] style C stroke-dasharray: 5 5 </pre> <p>Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2009 tentang PemberlakuanSNI mengenai Luminer sebagai Standar Wajib; TMT 11-08-2009</p> <p>Permen ESDM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Permen Nomor 17 Tahun 2009 tentang PemberlakuanSNI mengenai Luminer sebagai Standar Wajib; TMT 11-08-2009</p> <p>Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast; TMT 19 April 2011</p> <p>Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembubuhan Label Tanda Hemat Energi Untuk Lampu Swabalast; TMT 18-06-2014</p>	

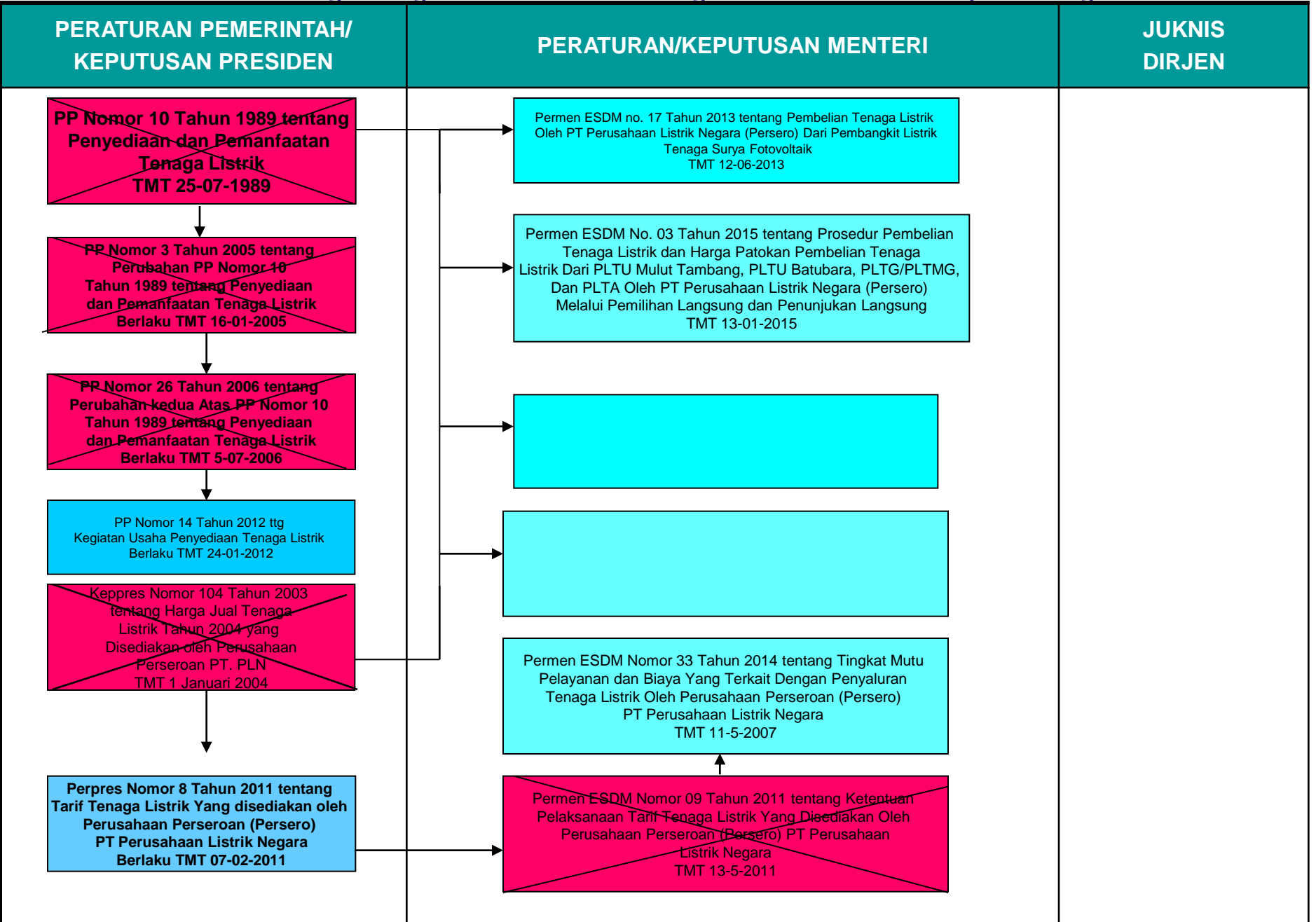
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

3. Harga Tenaga Listrik & Jual Beli Tenaga Listrik serta Sewa Menyewa Jaringan



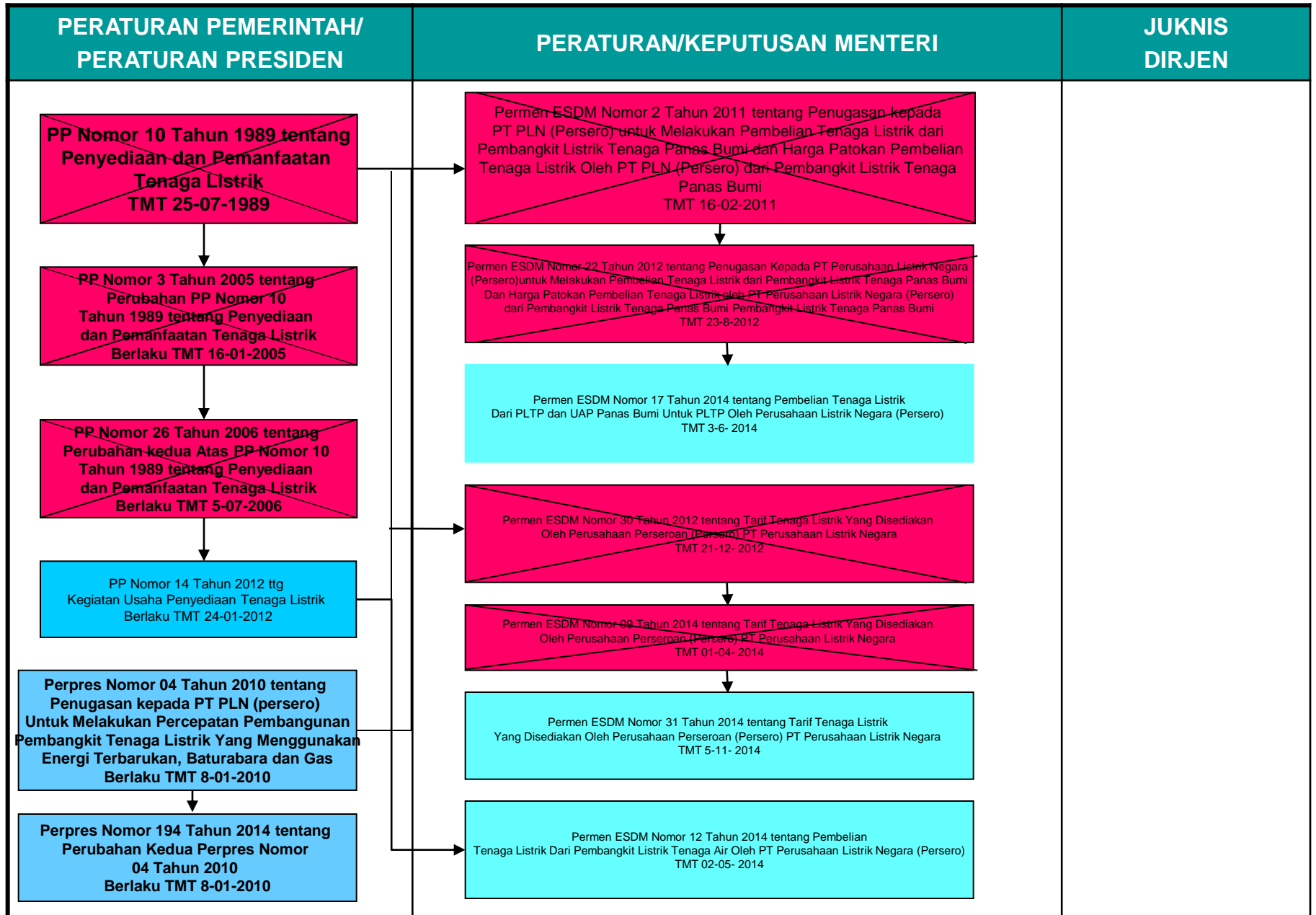
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

3. Harga Tenaga Listrik & Jual Beli Tenaga Listrik serta Sewa Menyewa Jaringan



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

3. Harga Tenaga Listrik & Jual Beli Tenaga Listrik serta Sewa Menyewa Jaringan (Lanjutan)



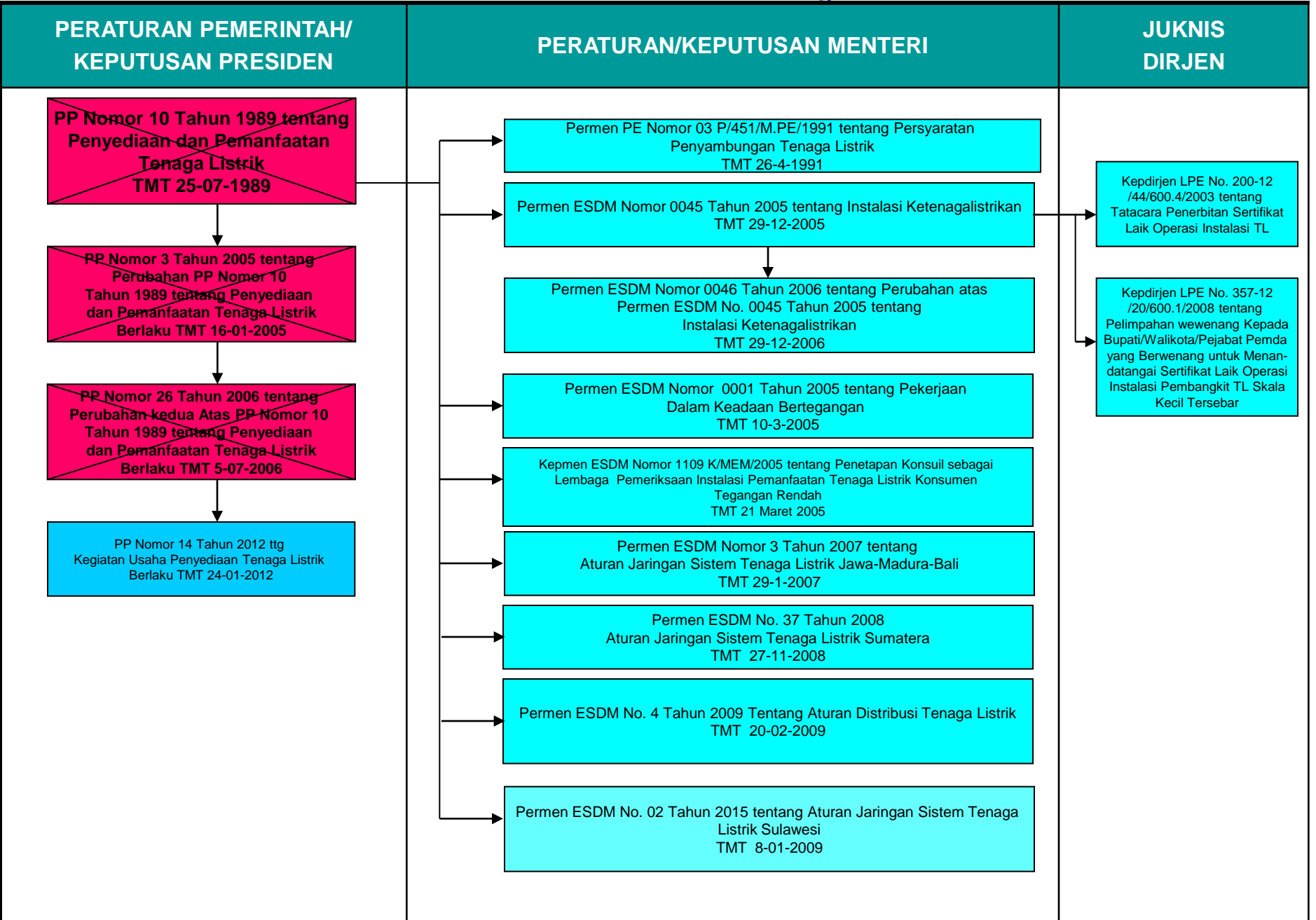
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

3. Harga Tenaga Listrik & Jual Beli Tenaga Listrik serta Sewa Menyewa Jaringan (Lanjutan)

PERATURAN PEMERINTAH/ PERATURAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<div style="background-color: #ff0066; color: black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik TMT 25-07-1989 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="background-color: #ff0066; color: black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 16-01-2005 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="background-color: #ff0066; color: black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 5-07-2006 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="background-color: #00bfff; color: black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 14 Tahun 2012 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berlaku TMT 24-01-2012 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="background-color: #00bfff; color: black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Perpres Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penugasan kepada PT PLN (persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Baturabara dan Gas Berlaku TMT 8-01-2010 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="background-color: #00bfff; color: black; padding: 5px; text-align: center;"> Perpres Nomor 194 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 04 Tahun 2010 Berlaku TMT 8-01-2010 </div>	<div style="background-color: #00ffff; color: black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) TMT 02-05- 2014 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="background-color: #00ffff; color: black; padding: 5px; text-align: center;"> Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) TMT 13-08- 2014 </div>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

4. Keselamatan & Instalasi Ketenagalistrikan



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

5. Perijinan dan Daerah Usaha

PERATURAN PEMERINTAH/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p>PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik TMT 25-07-1989</p>	<p>Kepmen ESDM Nomor 1122K/30/MEM/2002 tentang Pedoman Pengusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Skala Kecil Tersebar TMT 12-6-2002</p>	
<p>PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 16-01-2005</p>	<p>Permen ESDM Nomor 002 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan Skala Menengah Berlaku TMT 18-1-2006</p>	
<p>PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 5-07-2006</p>	<p>Permen ESDM No. 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Keperasi atau Badan Usaha Lain TMT 18-06-2009</p>	
<p>PP Nomor 14 Tahun 2012 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berlaku TMT 24-01-2012</p>	<p>Permen ESDM No. 31 Tahun 2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik TMT 13-11-2009</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan Skala Kecil Dan Menengah Atau Kelebihan Tenaga Listrik TMT 31-1-2012</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota TMT 31-1-2012</p>	
	<p>Permen PE Nomor 02/451/M.PE/1991 tentang Hubungan PKUK dan PIUKU dengan Masyarakat TMT 26-4-1991</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 0010 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan Untuk Lintas Provinsi Atau Yang Terhubung Dengan Jaringan Transmisi Nasional TMT 25-4-2005</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum TMT 14-8-2008</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

5. Perijinan dan Daerah Usaha

PERATURAN PEMERINTAH/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p>PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik TMT 25-07-1989</p> <p>PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 16-01-2005</p> <p>PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 5-07-2006</p> <p>PP Nomor 14 Tahun 2012 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berlaku TMT 24-01-2012</p>	<p>Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Daerah Usaha Bagi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum TMT 14-8-2008</p> <p>Permen ESDM No. 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum TMT 27-11-2012</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 0074 K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) Tahun 2015-2024 TMT 12-01-2015</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 2682 K/21/MEM/2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional TMT 13-12-2008</p> <p>Permen ESDM No. 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yg Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait TMT 27-08-2010</p> <p>Permen ESDM No. 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Permen ESDM No. 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yg Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait TMT 6-11-2014</p> <p>Permen ESDM No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Tempat Permen ESDM No. 15 Tahun 2010 Tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yg Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait TMT 6-11-2014</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

6. Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik

PERATURAN PEMERINTAH/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p>PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik TMT 25-07-1989</p> <p>PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 16-01-2005</p> <p>PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 5-07-2006</p> <p>PP Nomor 14 Tahun 2012 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berlaku TMT 24-01-2012</p>	<p>Permen ESDM Nomor 0048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika TMT 22-9-2006</p> <p>Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Yang Dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi TMT 22-9-2006</p> <p>Permen ESDM No. 01 Tahun 2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik TMT 06-01-2015</p>	<p>JUKNIS DIRJEN</p>

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

7. Usaha Penunjang

PERATURAN PEMERINTAH/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p data-bbox="48 278 531 435">PP Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik Berlaku TMT 10-08-1995</p> <p data-bbox="48 535 521 685">PP Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Berlaku TMT 6-07-2012</p>	<p data-bbox="734 292 1497 428">Kepmen PE Nomor 2500.K/40/M.PE/1997 tentang UPTL Bidang Konsultasi, Bidang Pembangunan dan Pemasangan dan Bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan TMT 12-12-1997</p> <p data-bbox="734 449 1497 535">Permen ESDM No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan TMT 20-12-2013</p> <p data-bbox="734 578 1497 664">Permen ESDM No. 10 Tahun 2014 Ttg Tata Cara Penyediaan dan Penetapan Harga Batubara Untuk Pembangkit Listrik Mulut Tambang TMT 04-04-2014</p> <p data-bbox="734 685 1497 835">Kepmen ESDM No. 2339 K/26/MEM/2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Dalam Pemberian Keputusan Perizinan Di Bidang Ketenagalistrikan TMT 14-04-2014</p> <p data-bbox="734 849 1497 985">Permen No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan TMT 4-02-2014</p> <p data-bbox="734 1013 1487 1135">Permen No. 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik TMT 16-10-2014</p> <p data-bbox="734 1163 1487 1285">Permen ESDM No. 36 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika TMT 24-12-2013</p>	

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

8. Lingkungan Hidup

PERATURAN PEMERINTAH/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
<p>PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik TMT 25-07-1989</p> <p>PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 16-01-2005</p> <p>PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Berlaku TMT 5-07-2006</p> <p>PP Nomor 14 Tahun 2012 ttg Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Berlaku TMT 24-01-2012</p>	<p>Permen PE Nomor 01 P/47/M.PE/1992 tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk Penyaluran Tenaga Listrik TMT 7-2-1992</p> <p>Kepmen PE Nomor 975 K/47/MPE/1999 tentang Perubahan Permen PE Nomor 01 P/47/M.PE/1992 TMT 11-5-1999</p> <p>RPermen tentang Pedoman Teknis Penyusunan Amdal Kegiatan Ketenagalistrikan</p> <p>RPermen tentang Penetapan Teknis Penyusunan UKL & UPL Kegiatan Ketenagalistrikan</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 2187 K/20/MEM/2013 tentang Perpanjangan Penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) Sebagai Lembaga Pemeriksa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah TMT 30-4-2013</p> <p>Permen ESDM No. 38 Tahun 2013 tentang Kompensasi Atas Tanah, Bangunan dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi TMT 24-12-2013</p>	

KERANGKA REGULASI SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN

LEGISLASI	KERANGKA REGULASI			
UNDANG-UNDANG	(RENCANA) PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL
UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi TMT 10-08-2007	PP No. 70 Tahun 2009 Konservasi Energi TMT 16-11-2009	Perpres No. 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan DEN& Tatacara Penyaringan Calon Anggota DEN TMT 7-05-2008	Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kode Etik dan Tata Tertib Dewan Energi Nasional TMT 11-05-2011	
	PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional TMT 17-10-2014	Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional TMT 25-1-2006	Permen ESDM Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi TMT 24-02-2011	
	[Empty Box]	Keppres Selaku Ketua DEN No. 11 Tahun 2009 tentang Susunan dan Tata Kerja Setjen DEN TMT 22-04-2009	Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Permen ESDM Nomor 04 Tahun 2011 TMT 10-05-2013	
		Keppres No. 17/P Tahun 2009 TMT 18-03-2009	Kepmen ESDM Nomor 0002 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pengembangan Energi baru terbarukan Dan Konservasi Energi Pengembangan Energi Hijau TMT 2-01-2004	
		Perpres No. 4 Tahun 2010 tentang Penugasan PT. PLN Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan PTL yang Meggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas TMT 8-1-2010	Permen ESDM Nomor 014 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional TMT 31-07-2009	
		Perpres No. 1 Tahun 2014 ttg Pedoman Peynusunan Rencana Umum Energi Nasional TMT 22-1-2014	Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja TMT 11-09-2009	

PERATURAN PELAKSANAAN SEKTOR ENERGI BARU TERBARUKAN

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<div style="border: 1px solid black; background-color: #0000ff; color: white; padding: 10px; margin-bottom: 10px; text-align: center;"> UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi TMT 10-08-2007 </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffcc00; padding: 10px; text-align: center;"> PP No. 70 Tahun 2009 Konservasi Energi TMT 16-11-2009 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2013 TMT 11 Januari 2013 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Permen ESDM Nomor 03 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Perdesaan Tahun Anggaran 2014 TMT 17 Januari 2013 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi TMT 30 Mei 2012 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #90ee90; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>		

KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR PANAS BUMI

LEGISLASI	KERANGKA REGULASI				
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/ KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	DAERAH
<div style="border: 1px solid black; background-color: #FF00FF; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi TMT 22-10-2003 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #00BFFF; padding: 5px; text-align: center;"> UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi TMT 17-09-2014 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi TMT 5 November 2007 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> PP Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP No. 59 Tahun 2007 TMT 20 Oktober 2015 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> PP Nomor 75 Tahun 2015 ttg Perubahan Kedua Atas PP No. 59 Tahun 2007 TMT 14 Oktober 2015 </div> <div style="border: 1px dashed black; background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 5px;"> RPP tentang Pemanfaatan Langsung Panas Bumi </div> <div style="border: 1px dashed black; background-color: #FFD700; padding: 5px; text-align: center;"> RPP tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #FF00FF; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Keppres Nomor 22 Tahun 1981 tentang Pemberian Kuasa Pengusaha Eksplorasi Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Kepada Pertamina TMT 1 Juni 1981 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #FF00FF; padding: 5px; text-align: center;"> Keppres Nomor 75 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik TMT 31 Mei 2000 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #00FF00; padding: 5px; text-align: center;"> Kep MESDM Nomor 667 K/11/MEM/2002 tentang Penugasan Kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral dan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Dalam Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik TMT 14 Mei 2002 </div>		

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR PANAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffcc66; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi TMT 5 November 2007 </div>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Permen ESDM Nomor 05 Tahun 2007 Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi TMT 12 Juli 2007</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">Permen ESDM Nomor 002 Tahun 2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi TMT 30 Januari 2009</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">Kepmen ESDM No. 2071 K/30/MEM/2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi TMT 30 Januari 2009</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">Kepmen ESDM No. 3499 K/30/MEM/2012 tentang Penetapan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi TMT 30 Januari 2009</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi TMT 21 April 2009</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi TMT 25 Juni 2009</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">Permen ESDM Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Permen ESDM No. 11 Thn 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi TMT 20 Juni 2012</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">R. Permen ESDM tentang Tata Cara Penempatan dan Pencairan Kembali Dana Lelang dan Jaminan Pelaksanaan Eksplorasi atau Eksploitasi</p> <p style="text-align: center;">▼</p> <p style="text-align: center;">R. Permen tentang Tata Cara Penetapan Kompensasi Data Hasil Pelaksanaan Penugasan Survei Pendahuluan (Ps. 12)</p>		

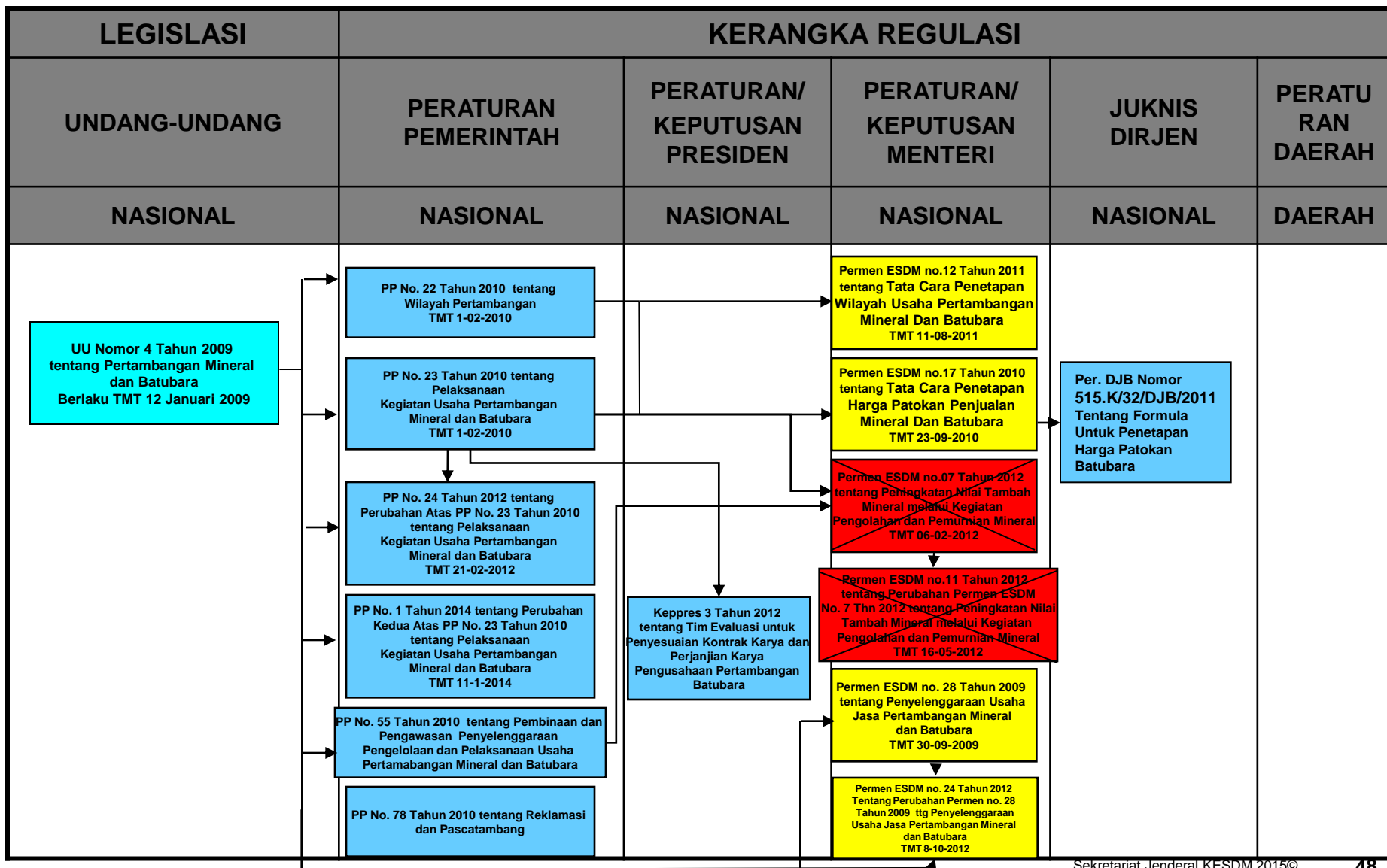
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR PANAS BUMI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<div style="border: 1px solid black; background-color: #FFD700; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PP Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi TMT 5 November 2007 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Eksplorasi Dalam Wilayah Hukum Pertambangan Panas Bumi (Ps. 13)</div> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Survei Pendahuluan (Ps. 5)</div> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Pedoman Penetapan Harga Uap Panas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Ps. 19)</div> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Tata Cara Penyetoran Besaran dan Pencairan Dana Jaminan Pasca Tambang</div> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Panas bumi</div> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Bentuk dan Tata Cara Pemberian Fasilitas</div> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data</div> <li style="margin-bottom: 10px;">→ <div style="border: 1px dashed black; background-color: #90EE90; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;">R. Permen tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Survei Pendahuluan (Ps. 5)</div> 		

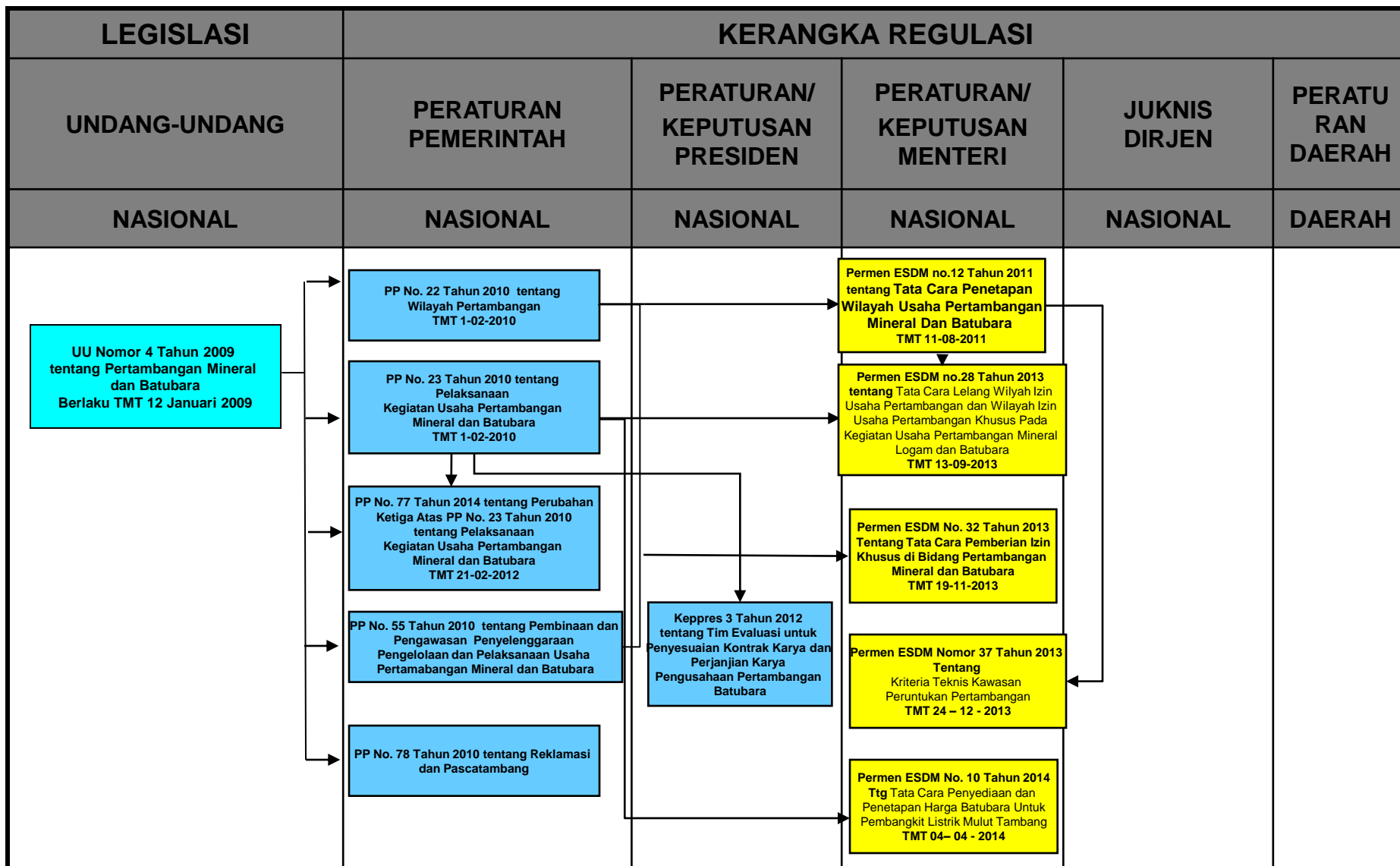
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

LEGISLASI	KERANGKA REGULASI				
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/ KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/ KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	DAERAH
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan TMT 02-12-1967</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berlaku TMT 12 Januari 2009</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan TMT 31 Desember 1969</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30 Desember 1992</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30 November 2001</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 33 Tahun 1969 tentang Pembentukan dan Susunan Dewan Pertambangan TMT 31 Desember 1969</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Kerja di Bidang Pertambangan TMT 14 April 1973</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian TMT 15 Agustus 1980</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat TMT 23 Agustus 1986</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada DESDM TMT 31 Juli 2003</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang Berlaku Pada KESDM TMT 6-01 2012</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Keppres Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara PN Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Keppres Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara antara PT BA dan Perusahaan Kontraktor</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Keppres Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara TMT 25 September 1996</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Peraturan Pelaksanaan</p> </div>

KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA



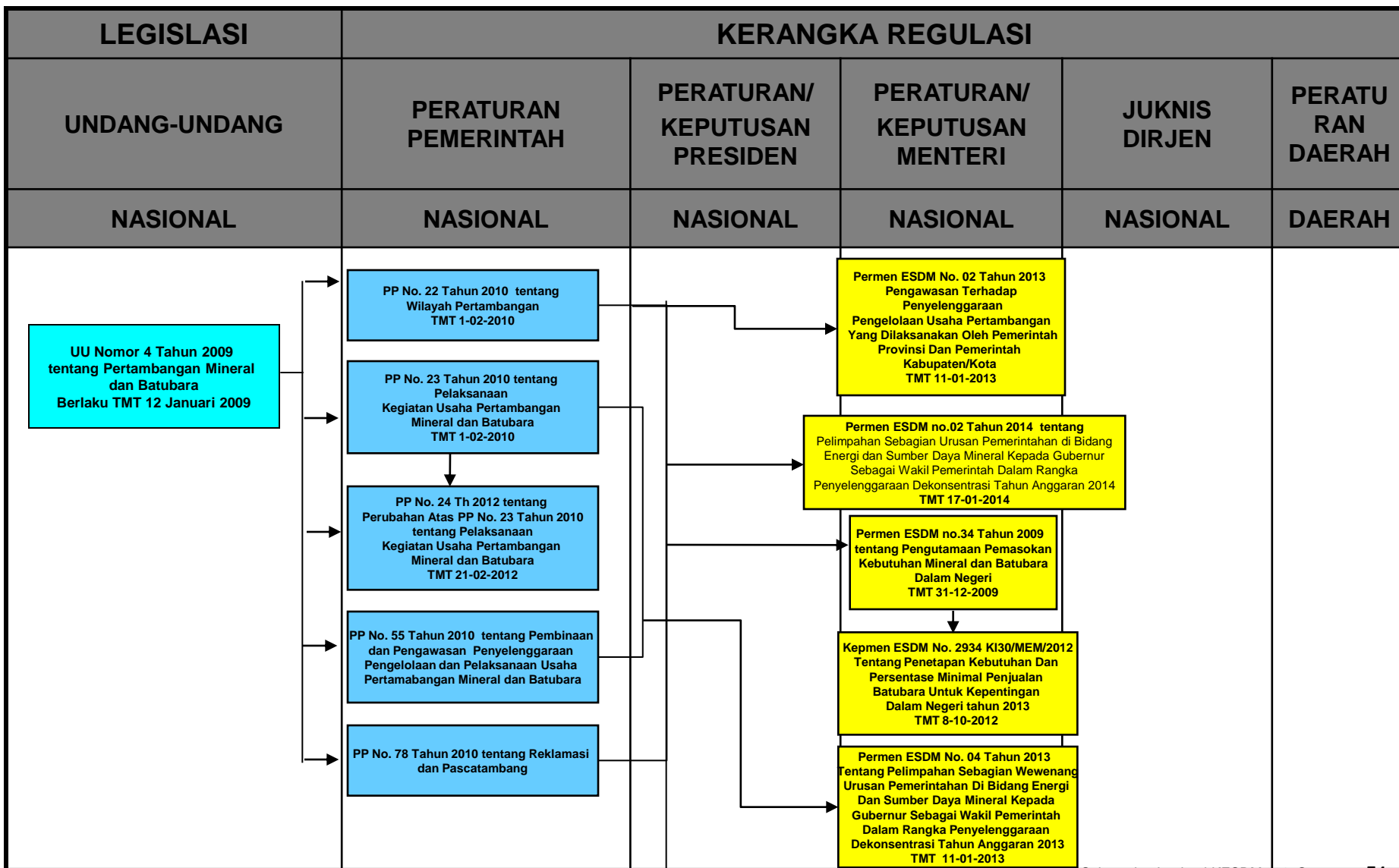
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA



KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

LEGISLASI	KERANGKA REGULASI				
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	DAERAH
<p>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berlaku TMT 12 Januari 2009</p>	<p>PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan TMT 1-02-2010</p> <p>PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 1-02-2010</p> <p>PP No. 24 Th 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 21-02-2012</p> <p>PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang</p>	<p>Keppres 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara</p>	<p>Permen ESDM no.07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral TMT 06-02-2012</p> <p>Permen ESDM no.11 Tahun 2012 tentang Perubahan Permen ESDM No. 7 Thn 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral TMT 16-05-2012</p> <p>Permen ESDM No. 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 7 Thn 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral TMT 01-08-2013</p> <p>Permen ESDM No. 01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri I TMT 11-01-2014</p> <p>Permen ESDM No. 27 Tahun 2013 Tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi aham, Serta Perubahan Penanaman Modal Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 13-09-013</p>		

KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA



KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR MINERAL DAN BATUBARA

LEGISLASI	KERANGKA REGULASI				
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	DAERAH
<p>UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berlaku TMT 12 Januari 2009</p>	<p>PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan TMT 1-02-2010</p> <p>PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 1-02-2010</p> <p>PP No. 24 Th 2012 tentang Perubahan Atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 21-02-2012</p> <p>PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara</p> <p>PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang</p>		<p>Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 28-02-2014</p> <p>Permen ESDM No.11 Tahun 2014 ttg Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian TMT 17-04-2014</p> <p>Permen ESDM No. 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota TMT 11-01-2013</p> <p>Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 30-12-2014</p>		

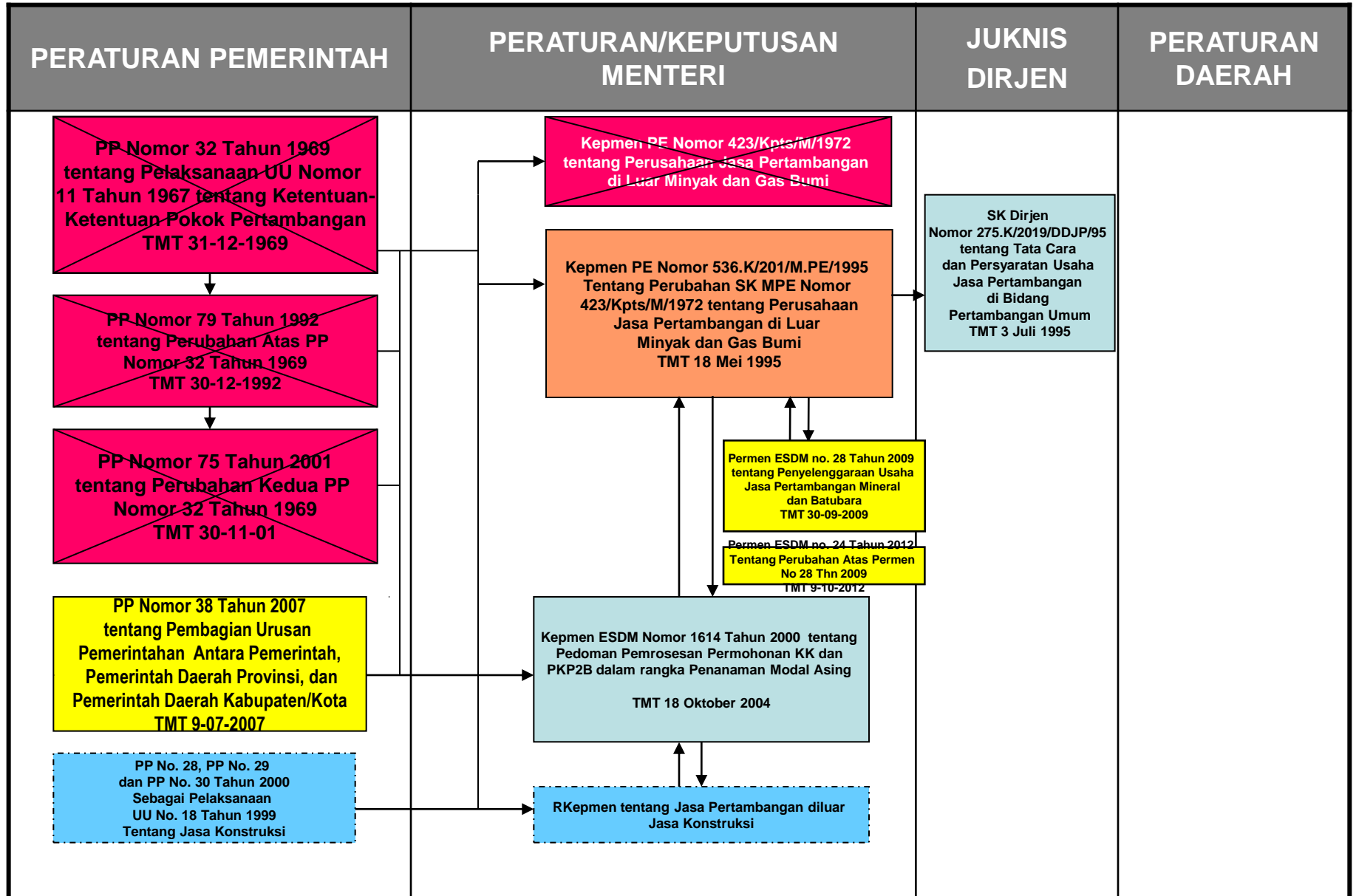
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

1. Iuran Pertambangan

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<p>PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan TMT 31-12-1969</p> <p>↕</p> <p>PP Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30-12-1992</p> <p>↕</p> <p>PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30-11-2001</p> <p>↕</p> <p>PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada DESDM TMT 31-07-2003</p> <p>↕</p> <p>PP Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang Berlaku Pada KESDM TMT 6-01 2012</p>	<p>Kepmen PE Nomor 351/Kpts/M/Pertamb/1972 tentang Iuran Tetap Bagi Usaha-usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Luar Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Kepmen PE Nomor 931.K/844/M.PE/86 tanggal 8 Agustus 1986 Tentang Perubahan Lampiran Kepmen Pertambangan Nomor 175.K/8443/M.PE/85 tanggal 15 Februari 1985 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 351/Kpts/M/Pertamb/72 Tentang Iuran tetap Bagi Usaha-Usaha Pertambangan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Luar Minyak dan Gas Bumi</p> <p>Kepmen PE Nomor 1165.K/844/M.PE/92 tanggal 12 September 1992 Tentang Penetapan Tarif Iuran Tetap untuk Usaha Pertambangan Umum Dalam Rangka Kuasa Pertambangan</p> <p>Kepmen PE Nomor 1166.K/844/M.PE/92 tanggal 12 September 1992 Tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk Usaha Pertambangan Umum</p> <p>Kepmen PE Nomor 104.K/844/M.PE/94 tanggal 19 Januari 1994 Tentang Perubahan Lampiran I Kepmen PE Nomor 1166.K/844/M.PE/92 tanggal 12 September 1992 Tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk Usaha Pertambangan Umum</p> <p>Kepmen PE Nomor 2338.K/844/M.PE/94 tanggal 12 Desember 1994 Tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk Bahan Galian Intan</p>		

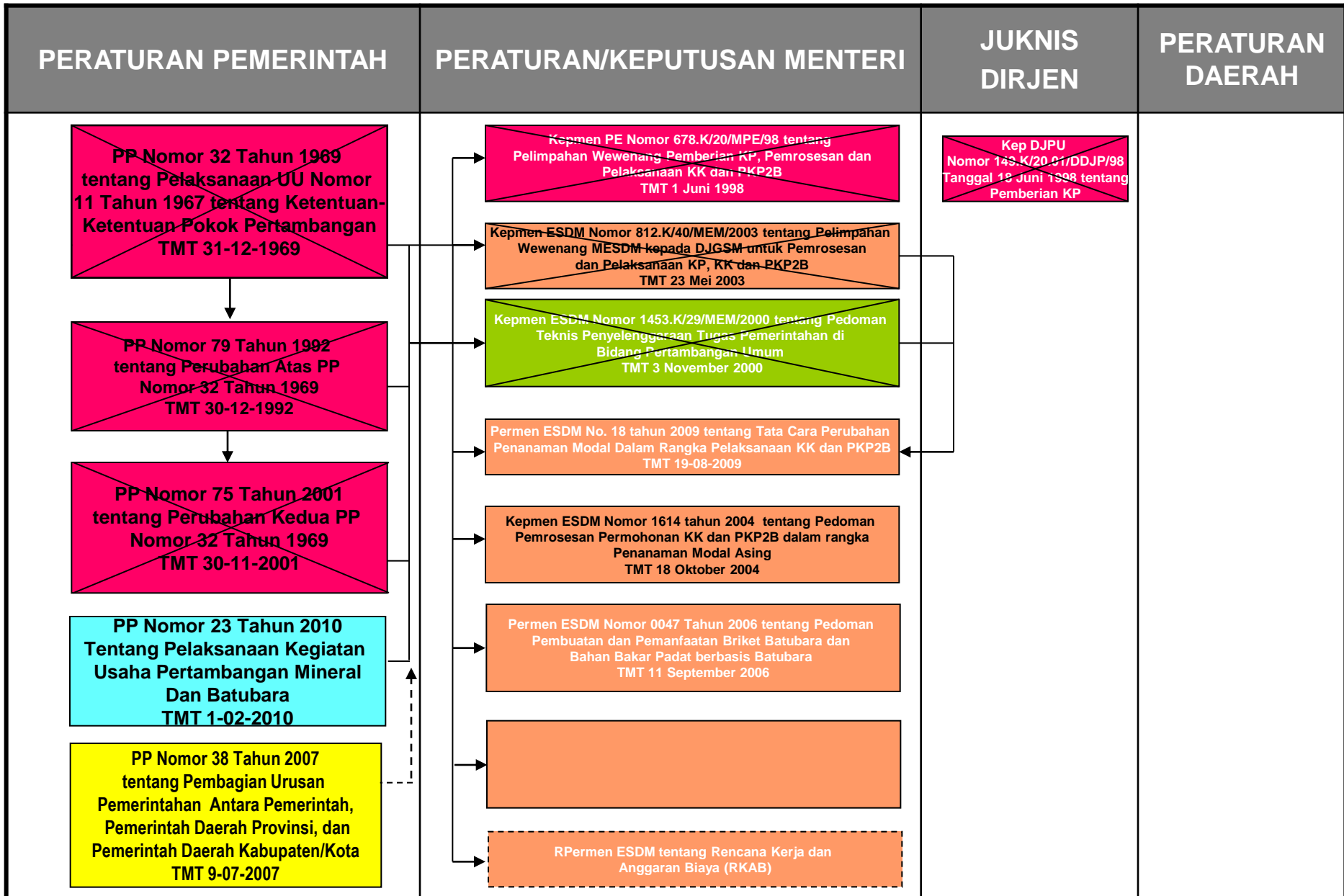
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

2. Jasa Pertambangan



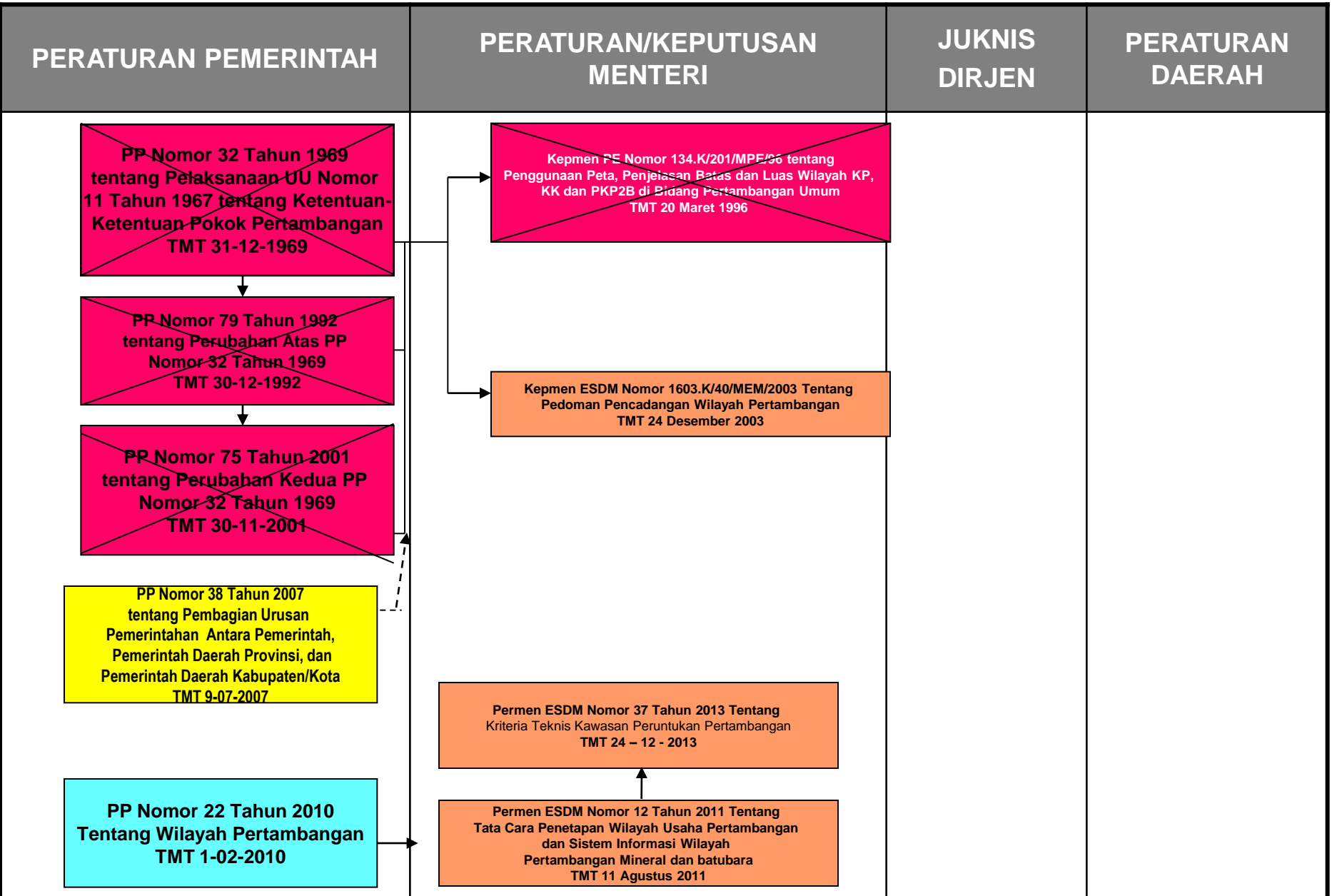
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

3. Tata Cara Perizinan KK, KP dan IUP



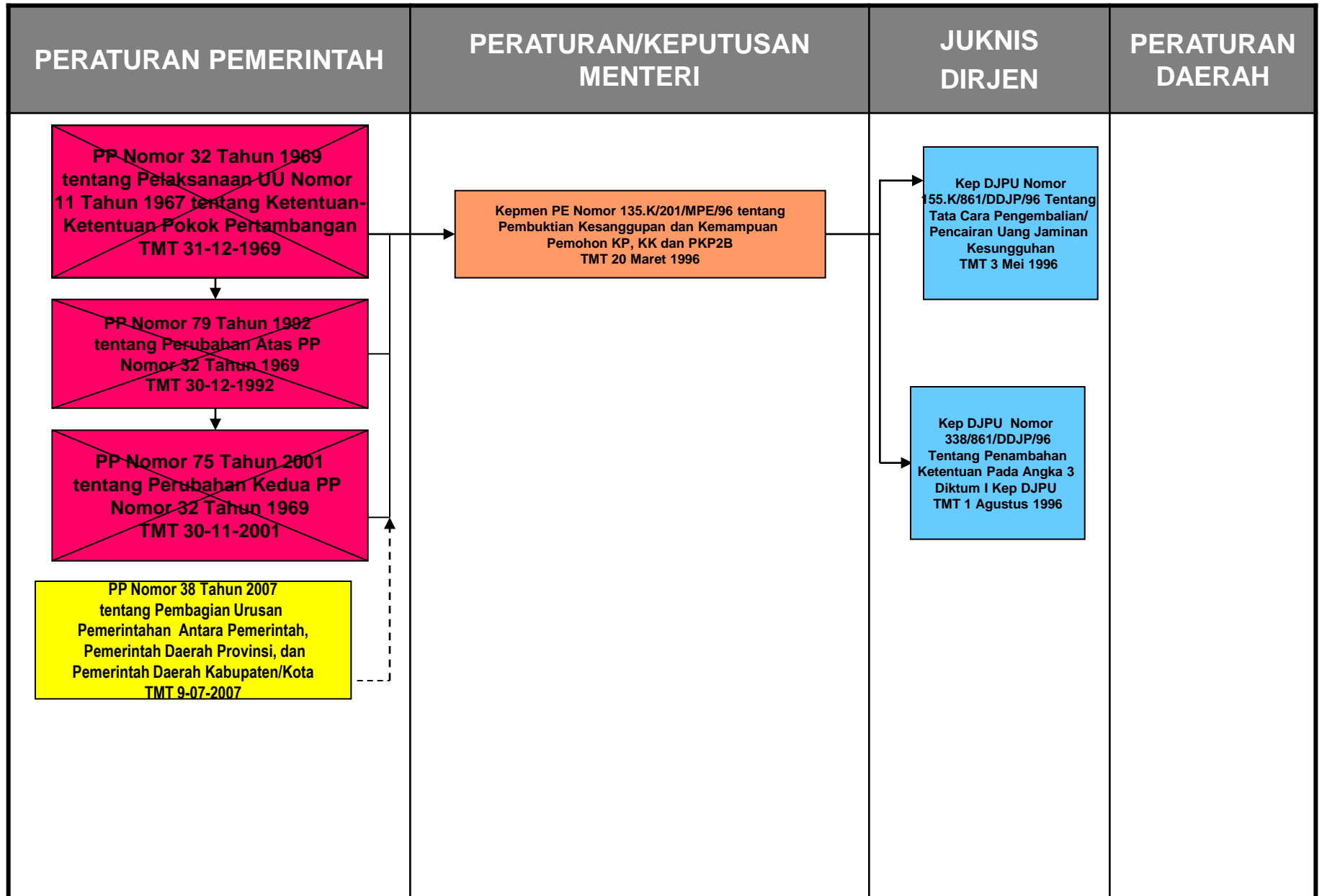
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

4. Pembuatan Wilayah Pertambangan



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

5. Pembuktian Kesanggupan/Kemampuan Modal Teknis



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA
6. Pengawasan Produksi Pertambangan

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<div style="border: 1px solid black; background-color: #ff00ff; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30-12-1992 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ff00ff; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30-11-2001 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffff00; padding: 5px; text-align: center;"> PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota TMT 9-07-2007 </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #ffcc99; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Kepmen PE Nomor 1261 K/25/MPE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan Umum TMT 6 September 1999 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffcc99; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Kepmen ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan KK dan PKP2B Dalam Rangka Penanaman Modal Asing TMT 18 Oktober 2004 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #ffcc99; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional TMT 5 Agustus 2008 </div> <div style="border: 1px dashed black; background-color: #ffff00; padding: 5px; text-align: center;"> <u>RKepmen ESDM tentang Penetapan Pembatasan Produksi Pertambangan Timah Nasional</u> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #00ffcc; padding: 5px; text-align: center;"> Kep DJPU Nomor 338/861/DDJP/96 Tentang Penambahan Ketentuan Pada Angka 3 Diktum I Kep DJPU TMT 1 Agustus 1996 </div>	

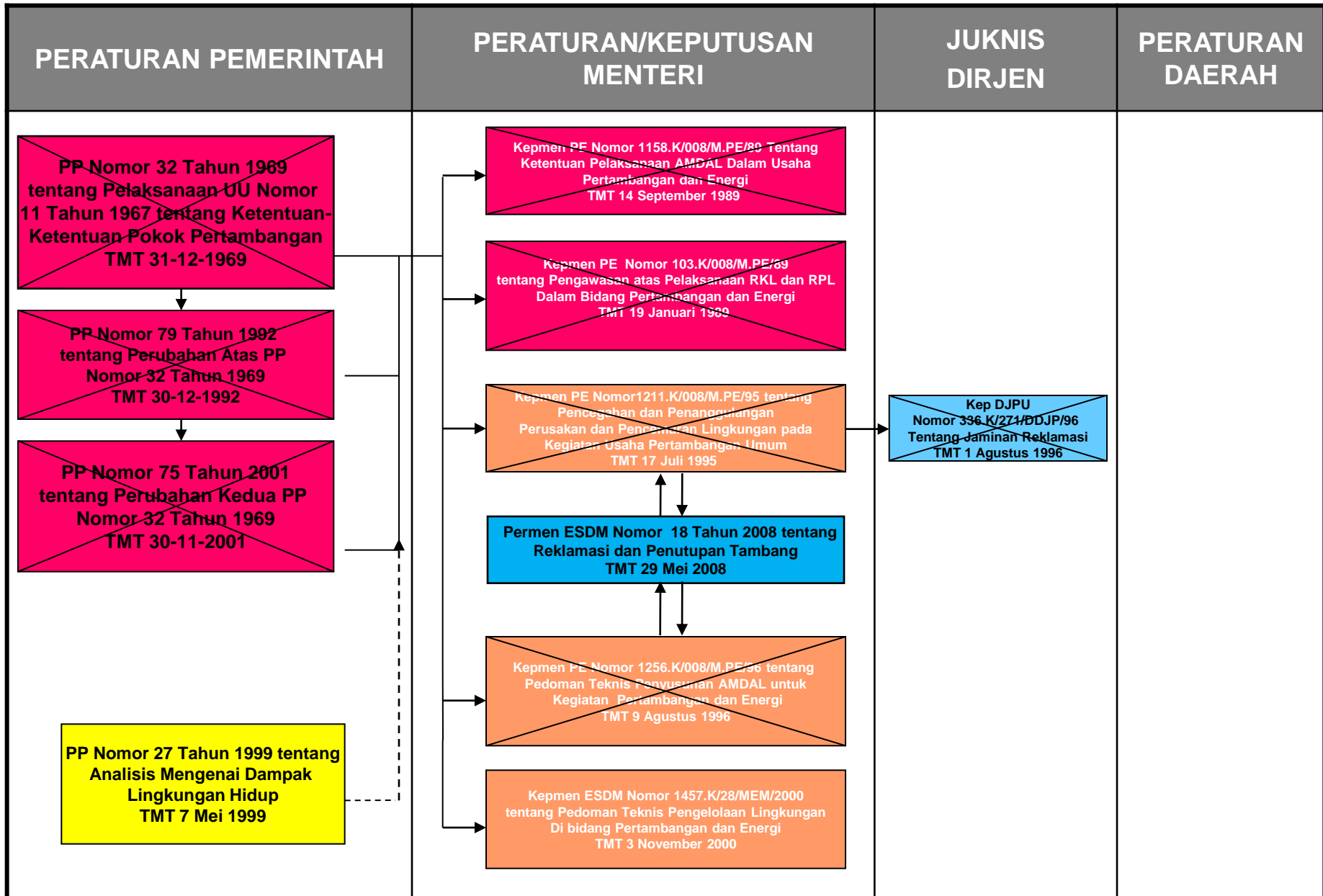
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

7. Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<p>PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan TMT 31-12-1969</p>	<p>SK MPE Nomor 2555.K/MPE/93 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum TMT 19 Juli 1993</p>	<p>SK DJPU Nomor 1245.K/26/DDJP/93 tentang Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Kerja Serta Lingkungan Pertambangan Bidang Pertambangan Umum TMT 9 September 1993</p>	
<p>PP Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30-12-1992</p>	<p>Kepmen PE Nomor 555.K/26/M.PE/95 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum TMT 22 Mei 1995</p>	<p>SK DJPU Nomor 1246.K/732/DDJP/93 tentang Pengangkatan Kepala PIT Dan Kepala Inspeksi Tambang Wilayah Bidang Pertambangan Umum TMT 9 September 1993</p>	
<p>PP Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 32 Tahun 1969 TMT 30-11-2001</p>	<p>Kepmen PAN Nomor 22/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya TMT 19 April 2002</p>	<p>SK DJPU Nomor 1247.K/732/DDJP/93 tentang Pengangkatan PIT Bidang PU TMT 9 September 1993</p>	
<p>PP Nomor 19 tahun 1973 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan TMT 14 April 1973</p>	<p>Keputusan Bersama MESDM dan Kepala BKN Nomor 1247.K/70/MEM/2002 Nomor 17 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang Dan Angka Kreditnya TMT 22 Juli 2002</p>	<p>SK DJPU Nomor 1247.K/732/DDJP/93 tentang Pengangkatan PIT Bidang PU TMT 9 September 1993</p>	
	<p>Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara TMT 26 Juli 2007</p>		

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

8. Lindungan Lingkungan



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

9. Standardisasi

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<p data-bbox="113 339 556 549">PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional TMT 10 November 2000</p> <p data-bbox="113 578 556 728">PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi TMT 5 Agustus 2004</p> <p data-bbox="113 785 556 968">PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional TMT 22 September 2006</p>	<p data-bbox="645 339 1251 429">Permen Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/0322/M.PE/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditasi Dalam Lingkungan Pertambangan dan Energi TMT 12 Juni 1995</p> <p data-bbox="645 446 1251 518">Kepmen ESDM Nomor 1086 K/40/MEM/2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi TMT 15 September 2003</p> <p data-bbox="645 546 1251 618">Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia</p> <p data-bbox="645 646 1251 736">Permen ESDM Nomor 006 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 26 Juli 2007</p> <p data-bbox="645 758 1251 848">Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara wajib TMT 3 Desember 2008</p> <p data-bbox="645 862 1251 933">RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Geologi/Eksplorasi Sertifikat Level 4 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p> <p data-bbox="645 948 1251 1019">RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Geologi/Eksplorasi Sertifikat Level 5 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p> <p data-bbox="645 1033 1251 1133">RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Pendek Sertifikat Level 4 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p> <p data-bbox="645 1148 1251 1248">RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Pendek Sertifikat Level 4 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p> <p data-bbox="645 1262 1251 1362">RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Pendek Sertifikat Level 5 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR MINERAL, DAN BATUBARA

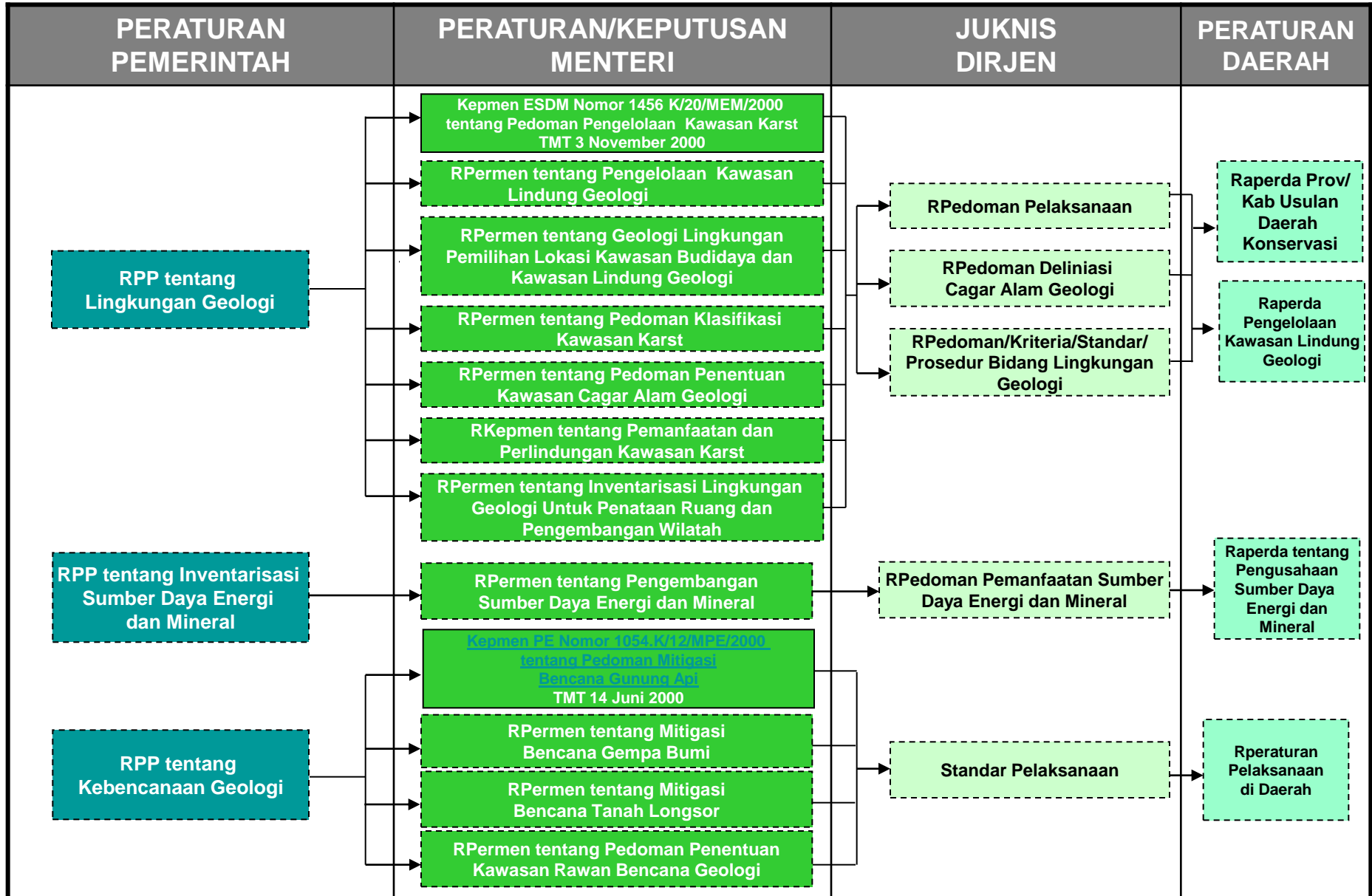
9. Standardisasi

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
	<p>RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Operasi Pertambangan Sertifikat Level 4 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		
	<p>RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Operasi Pertambangan Sertifikat Level 5 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		
	<p>RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Pengolahan Material Sertifikat Level 4 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		
	<p>RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Pengolahan Material Sertifikat Level 5 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		
	<p>RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Perawatan Peralatan Tambang Sub Bidang Peralatan Mekanik Sertifikat Level 4 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		
	<p>RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Perawatan Peralatan Tambang Sub Bidang Peralatan Ban (<i>Type Maintenance</i>) Sertifikat Level 5 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		
	<p>RPermen tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Khusus Teknis Perawatan Peralatan Tambang Sub Bidang Pengelasan Sertifikat Level 5 Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Secara Wajib</p>		
	<p>Permen ESDM No. 23 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara TMT 29-09-2009</p>		

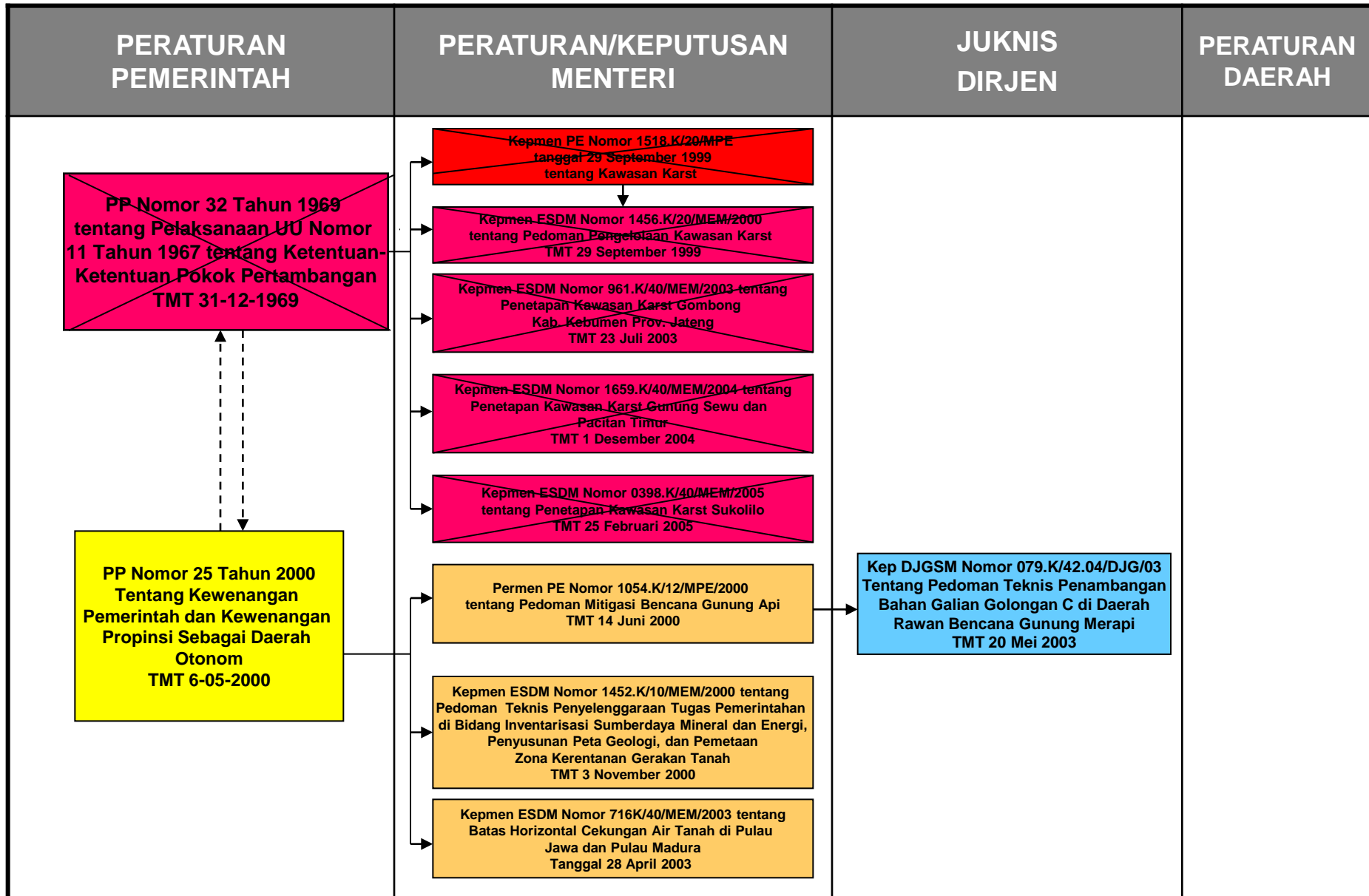
KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR GEOLOGI

LEGISLASI		KERANGKA REGULASI			
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	DAERAH
<div style="border: 1px dashed black; background-color: blue; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> RUU tentang Geologi </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPP tentang Standar Pemetaan Geologi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPP tentang Lingkungan Geologi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPP tentang Inventarisasi Sumber Daya Energi dan Mineral <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPP tentang Kebencanaan Geologi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> PP Nomor 102 Tahun 2000 tentang Sistem Standardisasi Nasional TMT 10 November 2000 <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Geologi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPP tentang Kompetensi dan Standardisasi Tenaga Ahli Geologi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #fde9d9; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Berlaku TMT 05-08-2004 	<ul style="list-style-type: none"> <li style="border: 1px dashed black; background-color: #ffff00; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPerpres tentang Pengelolaan Kawasan Karst Berkelanjutan <li style="border: 1px dashed black; background-color: #ffff00; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPerpres tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #ffff00; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPerpres tentang Perencanaan Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Geologi <li style="border: 1px dashed black; background-color: #ffff00; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPerpres tentang Pengelolaan Sumber Daya Energi dan Mineral <li style="border: 1px dashed black; background-color: #ffff00; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">RPerpres tentang Mitigasi Bencana Geologi 			

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR GEOLOGI



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR GEOLOGI



PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR GEOLOGI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<p>PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan TMT 31-12-1969</p>	<p>Kepmen PE Nomor 1518.K/20/MPE tanggal 29 September 1999 tentang Kawasan Karst</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst TMT 29 September 1999</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 961.K/40/MEM/2003 tentang Penetapan Kawasan Karst Gombang Kab. Kebumen Prov. Jateng TMT 23 Juli 2003</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 1659.K/40/MEM/2004 tentang Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur TMT 1 Desember 2004</p> <p>Kepmen ESDM Nomor 0398.K/40/MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo TMT 25 Februari 2005</p>		
<p>PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom TMT 6-05-2000</p>	<p>Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang alam Karst TMT 20 Juni 2012</p> <p>Kepmen ESDM No. 2641 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo TMT 16-05-2014</p> <p>Kepmen ESDm No. 3043 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombang TMT 04-07-2014</p> <p>Kepmen ESDM No. 3045 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gunung Sewu TMT 04-07-2014</p>		

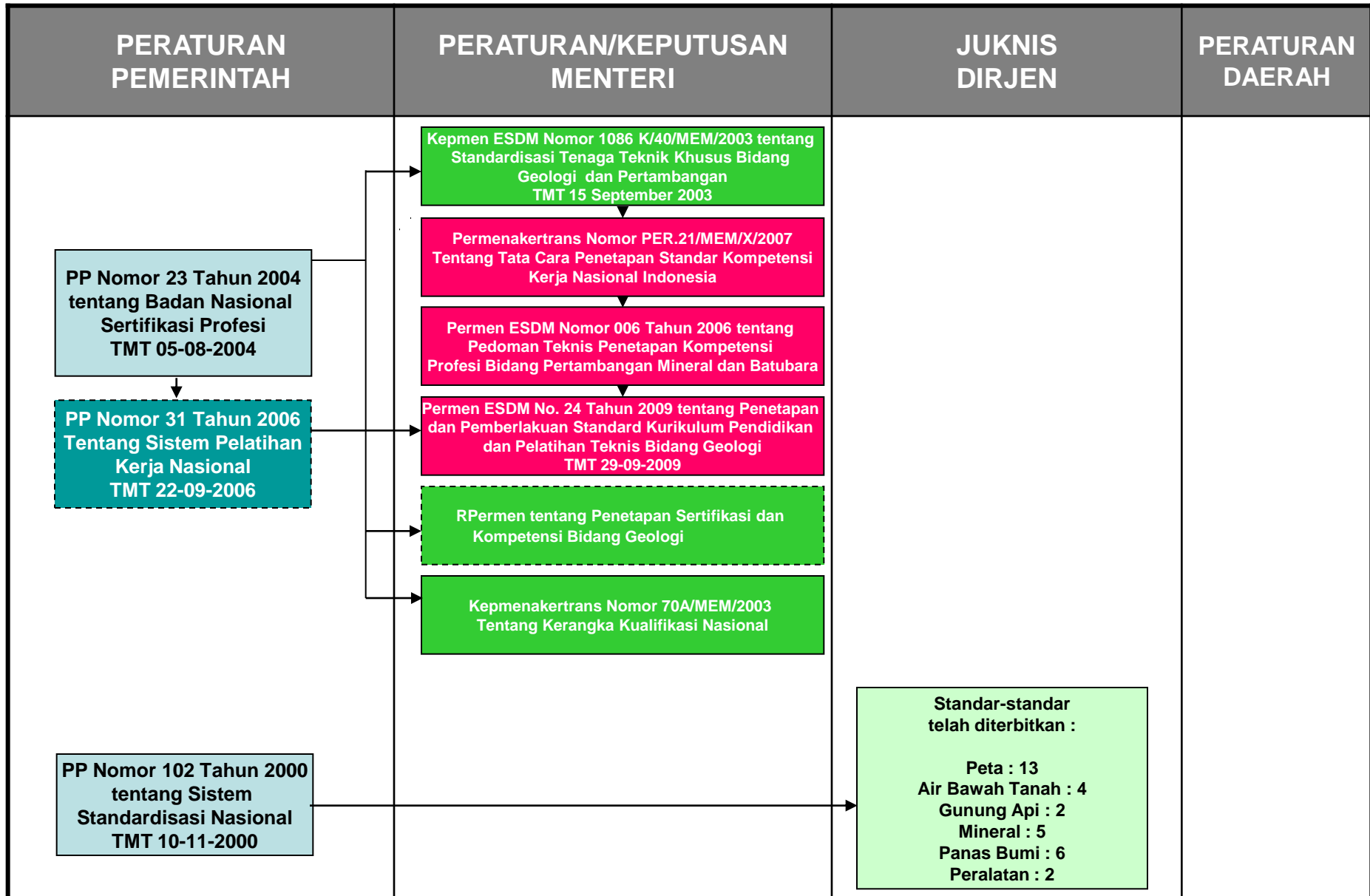
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR GEOLOGI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<div style="border: 2px solid black; background-color: #ff00ff; padding: 10px; margin-bottom: 20px; text-align: center;"> PP Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pertambangan TMT 31-12-1969 </div> <div style="border: 2px solid black; background-color: #ffff00; padding: 10px; text-align: center;"> PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom TMT 6-05-2000 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> </div>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Kepmen ESDM No. 3043 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong TMT 04-07-2014 </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Kepmen ESDM No. 3873 K/40/MEM/2014 tentang Perubahan Atas Kepmen ESDM No. 3043 K/40/MEM/2014 ttg Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong TMT 04-07-2014 </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; height: 40px; margin-bottom: 5px; margin-top: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; height: 40px; margin-bottom: 5px; margin-top: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; height: 40px; margin-bottom: 5px; margin-top: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; height: 40px; margin-bottom: 5px; margin-top: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #add8e6; height: 40px; margin-bottom: 5px; margin-top: 20px;"></div>		

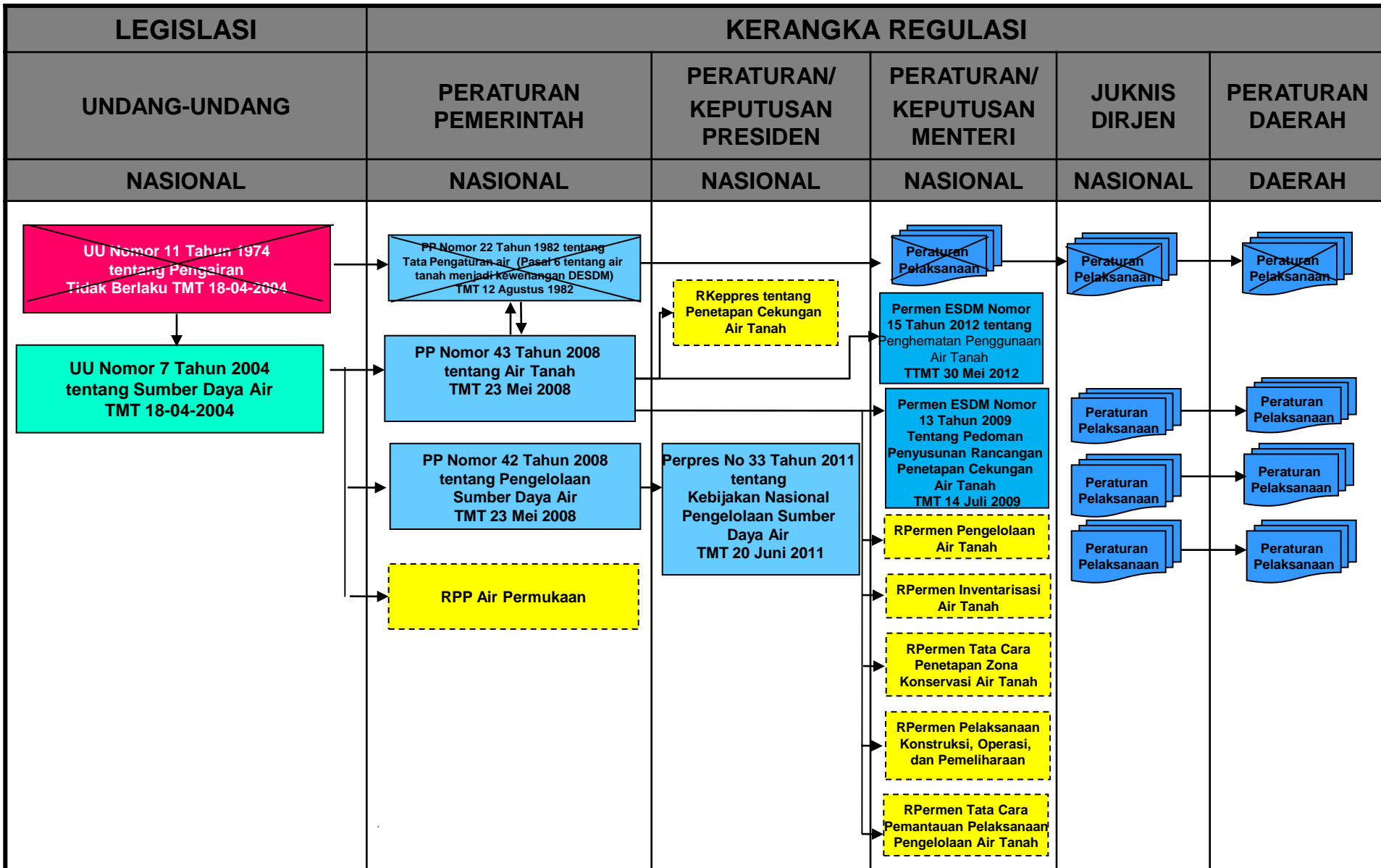
PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR GEOLOGI

PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
<p data-bbox="117 429 388 625"> PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana TMT 28-02-2008 </p>	<p data-bbox="450 444 720 625"> Perpres No 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulanga Bencana TMT 26 Januari 2008 </p>	<p data-bbox="768 472 1255 582"> Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunung Api, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami TMT 9 September 2011 </p>	<p data-bbox="1329 486 1561 582"> Peraturan Pelaksanaan </p>	<p data-bbox="1619 486 1850 582"> Peraturan Pelaksanaan </p>

PERATURAN PELAKSANAAN SUBSEKTOR GEOLOGI



KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR GEOLOGI



KERANGKA REGULASI SUBSEKTOR GEOLOGI

LEGISLASI	KERANGKA REGULASI				
UNDANG-UNDANG	PERATURAN PEMERINTAH	PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN	PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI	JUKNIS DIRJEN	PERATURAN DAERAH
NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	NASIONAL	DAERAH
			<ul style="list-style-type: none"> → RPermen Jaringan Sumur Pantau → RPermen Penghematan Air Tanah → RPermen Imbuhan Buatan → RPermen Pengendalian Penggunaan Air Tanah → RPermen Penetapan Zona Pemanfaatan Air Tanah → RPermen Penggunaan Air Tanah → RPermen Teknis Pengeboran atau Penggalian Air Tanah → RPermen Teknis Pengembangan Air Tanah → RPermen Pengendalian Daya Rusak Air Tanah → RPermen Perizinan dan Rekomendasi Teknis → RPermen Kualifikasi dan Klasifikasi Untuk Melakukan Pengeboran Dan Penggalian Air Tanah → RPermen Sistem Informasi Air Tanah → RPermen Teknis Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Air Tanah 		

Berikan saran Anda atas kerangka legislasi dan regulasi ini ke alamat :

- birohukum-sjh2@esdm.go.id